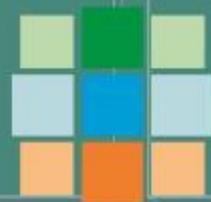


Vol. 02 No. 01 Juli 2020

e-ISSN : 2656-7415

Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota



SPACE

Sustainable, Planning and Culture



Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik
Universitas Hindu Indonesia

SINOPSIS

SPACE merupakan singkatan dari Sustainable, Planning and Culture. Menjadi nama Jurnal dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Hindu Indonesia. Keberadaan Jurnal Space bertujuan sebagai media komunikasi ilmiah dalam ranah keilmuan, khususnya bidang perencanaan wilayah dan kota. Jurnal ini diharapkan menjadi wadah dialog untuk membangun konsep keberlanjutan dalam konsep perencanaan dan kebudayaan sehingga menjadi katalisator bagi munculnya pemikiran secara terpadu dan komprehensif dalam menyelesaikan masalah dan konflik berkaitan dengan penataan ruang yang ada. Jurnal SPACE terbit 2 kali dalam setahun, pada bulan pertengahan dan akhir tahun.

PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas tersusunnya Jurnal SPACE (Sustainable, Planning, and Culture) Volume 2, Nomor 1, Juli 2020. Jurnal Space bertujuan sebagai media komunikasi ilmiah dalam ranah keilmuan, khususnya bidang perencanaan wilayah dan kota. Jurnal ini diharapkan menjadi wadah dialog untuk membangun konsep keberlanjutan dalam konsep perencanaan dan kebudayaan sehingga menjadi katalisator bagi munculnya pemikiran secara terpadu dan komprehensif dalam menyelesaikan masalah dan konflik berkaitan dengan penataan ruang yang ada.

Jurnal terdiri atas enam tulisan yang diawali tulisan berjudul Persepsi Rusunawa Ideal Pada Warga Huni Rusunawa Buring, Malang oleh Intan Rahmawati dan Nindya Sari. Tulisan kedua Hubungan Pengembangan Kawasan Bisnis Dan Pariwisata Terpadu Di Kota Makassar Terhadap Kawasan Pesisir Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar oleh Khairul Fuady dan Fadhil Surur. Artikel berikutnya berjudul Perencanaan Pengembangan Kawasan Wisata Banyuurip Desa Jatimulyo, Kecamatan Dlinggo, Kabupaten Bantul oleh Eka Widyaningsih. Artikel berikutnya berjudul Perencanaan Gapura di Kawasan MCK Terpadu Jl. Tirtarona RT 03, RW 07, Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang oleh Agustina Nurul Hidayati, Mohammad Reza, Fardiah Qonita, M. Dafa Murtado, Andhyka Putra B, Utas Satrio Pangintan, Evan. Tulisan Kelima berjudul Penentuan Zonasi Daerah Rawan Bencana Longsor Studi Kasus Di Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang oleh Mohammad Reza, Ghestiar Kharisma Kusumo, Mita Nur Bulan Sari, Alisya Fahsa Nur Rahmah, Tasya Almira Syah Putri, Yohanes Kurnia Natalino, Muhammad Ilham. Jurnal ini ditutup oleh tulisan berjudul Rapid Asesmen Kerusakan Bangunan Pasca Gempa Bumi Di Sekitar Masjid At-Taqqarub, Trienggading, Pidie Jaya, Aceh oleh Aldrin Febriansah.

Terbitnya edisi Jurnal SPACE ini merupakan kerjasama dari berbagai pihak. Redaksi mengucapkan terima kasih kepada mitra bestari yang berkenan memberi masukan dan mengkaji tulisan yang ada; para penulis yang telah meluangkan waktunya untuk menulis dan merevisi kembali tulisannya berdasarkan hasil tinjauan mitra bestari; dan tentunya seluruh anggota redaksi dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Hindu Indonesia (UNHI) yang telah bekerja keras dalam penyusunan jurnal ini.

Redaksi berharap bahwa jurnal ini dapat memberikan manfaat dan menambah khasanah pengetahuan di bidang perencanaan wilayah yang berbasis budaya lokal. Kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bentuk perbaikan dan pembaharuan demi peningkatan kualitas jurnal ini.

Redaksi Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik Universitas Hindu Indonesia
Jalan Sangalangit Tembawu Penatih Denpasar 80238
Telp. (0361) 464700/434800
pwk@unhi.ac.id atau space@unhi.ac.id
<https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/space>

EDITORIAL TEAM

EDITOR-IN-CHIEF

I Nyoman Harry Juliarthana, S.T., M.Sc.
Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Hindu Indonesia.
Email: harryjuliarthana@unhi.ac.id

ASSOCIATE (HANDLING) EDITOR

Komang Ayu Sari Galih, ST., MM

EDITORIAL BOARD

I Gusti Putu Anindya Putra, MSP
Dr. Ir. Nyoman Sukamara, CES
Ir. I Made Gde Sudharsana, Dipl.UM
Komang Wirawan, ST., M.Par
I Komang Gede Santhyasa, ST.,MT

INFORMATION TECHNOLOGY SUPPORT

I Komang Widanta Ruma, S.S.,M.Si.

REVIEWERS LIST

Prof. Ir. Gunawan Tjahjono, PhD., M.Arch (Universitas Indonesia)
Prof. Ir. Bakti Setiawan, MA., PhD (Universitas Gadjah Mada)
Prof.Dr-Ing.Widjaja Martokusumo (Institut Teknologi Bandung)
Dr. Ir. Ibnu Sasongko, MT (Institut Teknologi Nasional Malang)
Dr. Ir. Agus Dwi Wicaksono. Lic. Ler. Reg (Universitas Brawijaya)
Dr. Ir. Ragil Haryanto, MSP (Universitas Diponegoro)

COVER

I Nyoman Harry Juliarthana. ST., MSc.

ALAMAT REDAKSI

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik Universitas Hindu Indonesia
Jalan Sangalangit, Tembau, Penatih, Denpasar, 80238
pwk@unhi.ac.id atau space@unhi.ac.id
<https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/space>
(0361) 464700/434800

PETUNJUK PENGIRIMAN NASKAH

1. Redaksi Jurnal Space menerima tulisan/artikel ilmiah dalam bidang Perencanaan Wilayah dan Kota atau yang berkaitan dengan esensi perencanaan wilayah dan kota.
2. Naskah dapat berupa hasil penelitian, pemikiran, dan/atau kajian kritis terhadap suatu pustaka, yang belum dan tidak akan dipublikasikan dalam media cetak serupa.
3. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia. Naskah berupa ketikan (dua eksemplar), rekaman dalam Compact Disc (CD) atau dikirim via email sebagai lampiran (attachment file). Naskah diketik dengan Ms. Word dalam format *.doc (Word 97-2003) atau *.rtf.
4. Sistematika penulisan disusun sebagai berikut:
 - a. Bagian awal: judul, nama penulis (disajikan lengkap tanpa gelar), email, Institusi, abstrak (dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, tidak lebih dari 200 kata, satu spasi, dan memuat tujuan, metode, dan hasil).
 - b. Bagian utama: pendahuluan (latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian), tulisan pokok (tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan), kesimpulan.
 - c. Bagian akhir: ucapan terimakasih (jika dipandang perlu), daftar pustaka.
5. Judul ditulis singkat tetapi jelas dalam bahasa Indonesia, menunjukkan dengan tepat masalah yang hendak dikemukakan, ditulis seluruhnya dengan huruf kapital.
6. Teknik Penulisan:
 - a. Tulisan disusun 2 (dua) kolom, dengan huruf Times New Roman 11, spasi tunggal. Huruf judul ukuran 12 cetak tebal (*bold*), huruf judul bab ukuran 11 cetak tebal (*bold*), dan huruf judul subbab ukuran 11 cetak miring (*italic*). Tulisan abstrak berukuran 10 cetak miring (*italic*).
 - b. Penulisan paragraf baru dimulai pada ketikan keenam pada batas tepi kiri. Antarparagraf tidak diberi tambahan spasi.
 - c. Judul tabel ditulis di atas tabel dan judul gambar ditulis di bawah gambar. Setiap gambar dan tabel mempunyai nomor urut, dimulai dari 1 (satu). Huruf judul tabel dan gambar berukuran 10 cetak tebal (*bold*).
 - d. Tulisan/artikel ditulis sebanyak maksimum 15 halaman (3000-4000 kata)
 - e. Sistem penulisan daftar rujukan menggunakan sistem Harvard dan *reference manager Mendeley*. Penunjukannya di dalam naskah dengan mencantumkan nama penulis dan tahun penerbitan di antara tanda kurung pada akhir kalimat. contoh sebagai berikut:
 - i. Satu penulis: (Raharjo, 2005) atau Raharjo (2005)
 - ii. Dua penulis: (Raharjo dan/and Budi, 2005) atau Raharjo dan/and Budi (2005)
 - iii. Tiga atau lebih penulis : (Raharjo dkk./et al., 2005) atau Raharjo dkk./et al. (2005)
 - f. Daftar Pustaka ditulis dalam huruf Times New Roman 11, urutan berdasarkan abjad sesuai dokumen acuan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Buku : (Nama Belakang, Nama depan. Tahun Terbit. *Judul Buku*. Kota Terbit: Penerbit). Contoh sebagai berikut:
 - i. Tamin, Ofyar Z. 1997. *Perencanaan dan Pemodelan Transportasi*. Bandung: Penerbit ITB.
 - ii. Yunus, Hadi S. 2000. *Struktur Tata Ruang Kota*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
 - Artikel Jurnal: (Nama Belakang, Nama depan. Tahun Terbit. Judul Artikel. Nama Jurnal. Penerbit. Volume No (Halaman), tanggal terbit). Contoh sebagai berikut:

Giyarsih, Sri Rum. 2012. Dampak Transformasi Wilayah Terhadap Kondisi Kultural Penduduk (Tinjauan Perspektif Geografis), Jurnal Forum Geografi, Universitas Gajah Mada, vol 26 No. 2 (110-123), Desember 2012.
 - Peraturan: (Nama Instansi dan daerah. Tahun Terbit. *Judul Peraturan*). Contoh sebagai berikut:

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Denpasar. 2011. Peraturan Daerah Kota Denpasar No. 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar.
 - Skripsi/Tugas Akhir: (Nama Belakang, Nama depan. Tahun Terbit. *Judul Skripsi/Tugas Akhir*. Jurusan, Kota). Contoh sebagai berikut:

Pangi. 2007. Pola Penggunaan Lahan Pada Daerah Peri Urban Dengan Pendekatan Model Dinamis, studi kasus Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta, Tugas Akhir, Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro, Semarang
 - Media online: (Nama Media. Tahun. *Judul Artikel Berita* dan alamat website. Diakses pada (tanggal bulan tahun). Contoh sebagai berikut:

Bali Post. 2006. Orasi Perebutan Ruang dalam [http:// www. balipost. co.id/ balipostcetak/2006/4/7/p1.htm](http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2006/4/7/p1.htm). diakses Agustus 2013

- g. Margin jurnal: Mirror Margin
- Atas : 1 cm
 - Bawah : 1 cm
 - Dalam : 3 cm
 - Luar : 1 cm
7. Setiap tulisan yang akan dimuat dikaji substansinya oleh *reviewer* sesuai dengan bidang keahlian masing-masing, sekurang-kurangnya oleh para *reviewer* tetap yang akan tercantum dalam dewan redaksi (*editorial board*). Apabila dipandang perlu, redaksi akan memohon perubahan dan/atau penyempurnaan naskah yang dikirim, sesuai dengan saran pandangan para *reviewer*.
8. Bila diperlukan, redaksi akan mengubah dan memperbaiki ejaan tata tulis dan tata bahasa naskah yang dimuat.
9. Pengiriman naskah harus menyertakan identitas penulis, seperti:
- a. Nama lengkap
 - b. Keahlian
 - c. Lembaga/Institusi
 - d. Alamat
 - e. Alamat email

DAFTAR ISI

SINOPSIS	i
PENGANTAR.....	ii
PETUNJUK PENGIRIMAN NASKAH.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
PERSEPSI RUSUNAWA IDEAL PADA WARGA HUNI RUSUNAWA BURING, MALANG	1
HUBUNGAN PENGEMBANGAN KAWASAN BISNIS DAN PARIWISATA TERPADU DI KOTA MAKASSAR TERHADAP KAWASAN PESISIR KECAMATAN GALESONG UTARA KABUPATEN TAKALAR.....	5
PERENCANAAN PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA BANYUURIP DESA JATIMULYO, KECAMATAN DLINGGO, KABUPATEN BANTUL	12
PERENCANAAN GAPURA DI KAWASAN MCK TERPADU JL. TIRTARONA RT 03, RW 07, KELURAHAN TLOGOMAS, KECAMATAN LOWOKWARU, KOTA MALANG	20
PENENTUAN ZONASI DAERAH RAWAN BENCANA LONGSOR STUDI KASUS DI KECAMATAN TUMPANG, KABUPATEN MALANG	23
RAPID ASESMEN KERUSAKAN BANGUNAN PASCA GEMPA BUMI DI SEKITAR MASJID AT- TAQARRUB, TRIENGGADING, PIDIE JAYA, ACEH	30

PERSEPSI RUSUNAWA IDEAL PADA WARGA HUNI RUSUNAWA BURING, MALANG

Intan Rahmawati¹, Nindya Sari²

¹)Program Studi Ilmu Sosial ²)Program Studi Magister Perencanaan Kota dan Daerah

¹²)Universitas Brawijaya

¹)intanr@ub.ac.id

Abstract

The land which is a complex problem in the cities provides a mature readiness for the exam. The establishment of a simple rental apartment (rusunawa) was allegedly the best solution to overcome the problem. What's more with room prices that always show a high price increase every time periodically. However, the establishment of flat towers does not always benefit the wearer (residents). This article provides information for the ideal definition of a flat, can be used to make other flat towers so that residents can fulfill their prosperous wishes in inhabiting (housing welfare) in a flat land. This research was conducted with a qualitative approach in Rusunawa Buring, Kota Malang involving 10 informants who lived for a period (3 years). Data collection techniques are carried out by in-depth interviews, observation, and focus group discussions. The results of the research data show that residents live have the ideal perception of flat-lined apartments when physical, social, and system factors can provide live satisfaction

Keywords: Qualitative, perception, rusunawa

Abstrak

Lahan yang menjadi masalah kompleks di perkotaan memberikan dinamika kesiapan yang matang untuk menyelesaikannya. Pendirian rumah susun sederhana sewa (rusunawa) disinyalir menjadi solusi terbaik untuk mengatasi problem keterbatasan luas lahan di kota. Terlebih lagi dengan harga lahan yang selalu menunjukkan kenaikan harga yang tinggi setiap waktu berkala. Namun, pendirian rusunawa tidak selalu memberi keuntungan pada pemakainya (warga huni). Artikel ini memberikan ulasan untuk memahami persepsi rusunawa ideal, sehingga dapat menjadi gambaran pendirian rusunawa lainnya agar warga huni dapat mencapai perasaan sejahtera dalam menghuni (housing wellbeing) dalam menempati rusunawa. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif di Rusunawa Buring, Kota Malang dengan melibatkan 10 informan yang tinggal selama satu periode (3 tahun). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, dan diskusi kelompok terarah. Hasil pengumpulan data menunjukkan, bahwa warga huni memiliki persepsi rusunawa yang ideal bila faktor fisik bangunan, sosial, dan sistem tinggal dapat memberikan kepuasan tinggal.

Kata Kunci: Metode Penelitian Kualitatif, Persepsi, Rusunawa.

Pendahuluan

Latar Belakang

Kebijakan pendirian rusunawa yang termasuk dalam pengembangan daerah perkotaan merupakan suatu perubahan yang memberikan dampak langsung maupun tidak langsung. Terbatasnya ketersediaan lahan di perkotaan tidak diikuti dengan control permintaan lahan, sehingga menyebabkan melonjaknya harga lahan di kota. Bagi masyarakat yang tidak mampu menjangkau tingginya harga lahan pada akhirnya akan mencari lahan marjinal yang lemah pengawasan, seperti bantaran sungai, kolong jembatan, dan tempat lainnya yang tidak memiliki ijin membangun. Dampak tersebut terlihat dari munculnya pemukiman kumuh di perkotaan.

Mengantisipasi hal tersebut, pemerintah memberikan solusi untuk mengatasi tingginya kebutuhan hunian yang layak di tengah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan membangun rusunawa. Konsep hunian vertikal ini,

diyakini memberikan solusi untuk memaksimalkan lahan sempit yang dapat menampung kebutuhan hunian bagi banyak warga, termasuk salah satunya Rusunawa Buring, Kota Malang.

Undang-Undang No 16 Tahun 1985 menjelaskan bahwa pembangunan rusunawa bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat terutama yang berpenghasilan rendah, meningkatkan daya guna lahan dan hasil guna tanah dengan memperhatikan lingkungan, dan memenuhi kebutuhan untuk kepentingan lainnya bagi kehidupan masyarakat. Keberadaan rusunawa yang ditempati oleh golongan masyarakat menengah ke bawah yang hidup secara bersama-sama perlu diperhatikan perencanaannya secara utuh, antara lain memperhatikan latar belakang penghuni akan kebutuhan tinggal di dalam lingkungan tersebut, memperhatikan kebutuhan dan kebiasaan fisik, sosial, ekonomi serta kebiasaan perilaku penghuninya karena hal tersebut akan mempengaruhi perilaku penghuni menciptakan

lingkungan tinggal yang nyaman atau tidak nyaman.

Pengelolaan rusunawa yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan sosial tidak hanya dapat dipenuhi pada awal pembangunan atau bangunan fisik saja namun juga menyangkut dengan pengelolaan masyarakat yang tinggal di rusunawa tersebut sehingga disamping pembangunan fisik, sebuah lingkup pemukiman juga harus memperhatikan bagaimana pengelolaan masyarakat yang tinggal di dalamnya. Beberapa contoh terkait dengan teknis pembangunan serta pengelolaan dari rusunawa menjadi permasalahan yang nantinya akan berimbas pada efektifitas dari pembangunan rusunawa tersebut. Tidak tercapainya tujuan dari pembangunan rusunawa akan mengakibatkan kerugian di kedua belah pihak yakni pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan terlebih lagi warga yang tinggal di rusunawa yang merupakan objek dari kebijakan tersebut.

Penelitian ini berusaha untuk memahami persepsi rusunawa yang ideal menurut warga huni rusunawa. Pemahaman ini bertujuan agar pengambil kebijakan dapat mempertimbangkan situasi ideal yang diharapkan warga huni, sehingga misi pembangunan rusunawa dapat terlaksana dengan baik.

Metodologi Penelitian

Lingkup Studi dan Wilayah Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman mengenai gejala amatan yang berkaitan dengan kepuasan menghuni dan persepsi, sehingga dapat menjelaskan dinamika interaksi antara individu dengan tempat tinggalnya. Tehnik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan diskusi kelompok terarah pada 10 informan. Informan yang terlibat dalam penelitian ini merupakan warga huni Rusunawa Buring yang telah tinggal selama satu periode (3 tahun).

Prosedur analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah modifikasi metode Stevick-Colaizzi-Keen dari Moustakas (1994). Prosedur analisis dan interpretasi data meliputi (a) memulai dengan deskripsi tentang pengalaman peneliti terhadap fenomenon, (b) peneliti kemudian mencari pernyataan (dalam interview) mengenai bagaimana individu-individu mengalami topik (phenomenon) tersebut, membuat daftar dari pernyataan-pernyataan tersebut (horizontalization) dan perlakukan tiap pernyataan dengan seimbang (mempunyai nilai yang sama), dan mengembangkan daftar dari pernyataan yang tidak berulang (nonrepetitive) atau tidak tumpang tindih (nonoverlapping), (c) pernyataan kemudian dikelompokkan kedalam unit-unit makna (meaning units), buat daftar dari unit-unit ini, dan menuliskan deskripsi dari tekstur (deskripsi tekstural) dari pengalaman, yaitu apa yang terjadi, disertai contoh-contoh verbatim, (d) peneliti kemudian

merefleksikan berdasarkan deskripsinya sendiri dan menggunakan imaginative variation atau deskripsi struktural, mencari semua makna yang memungkinkan dan perspektif yang divergen, memperkaya kerangka pemahaman dari fenomenon, dan membuat deskripsi dari bagaimana fenomenon dialami, (e) peneliti kemudian membuat deskripsi keseluruhan dari makna dan esensi dari pengalaman, (f) dari deskripsi tekstural-struktural individu, berdasarkan pengalaman tiap partisipan, peneliti membuat composite textural-structural description dari makna-makna dan esensi pengalaman, mengintegrasikan semua deskripsi tekstural-struktural individual menjadi deskripsi yang universal dari pengalaman, yang mewakili kelompok (responden) secara keseluruhan (Moustakas, 1994).

Hasil dan Diskusi

Penelitian ini memberikan gambaran awal mengenai latar belakang informan memilih tinggal di Rusunawa Buring. Sebelum tinggal di Rusunawa Buring, seluruh informan tinggal pada hunian tapak di daerah masing-masing. Pengambilan keputusan pada rumah susun tidak terlepas dari fungsi rumah sebagai tempat istirahat dan harga yang lebih murah daripada kontrakan di rumah tapak. Seperti yang disampaikan oleh LH berikut,

"...kita ngontrak di kampung palingan minimal satu tahun tiga empat juta, kalo disini di kalkulasi satu tahun dua juta seratus" (LH.Al.12-14)

Hal yang sama juga disampaikan

"...Ya kan kalau hunian diluar sana kan mahal.." (KLF.Al.11-13)

Selain karena harga yang terjangkau, alasan menemani orangtua yang tinggal di rusunawa juga disampaikan oleh UM,

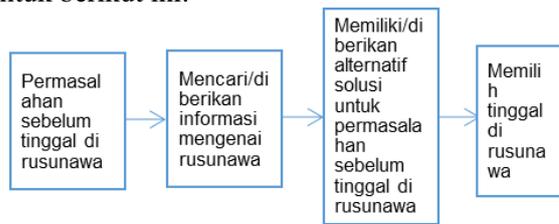
"...Soalnya saya bareng orang tua" (UM,Al.24)

Berikut ini terangkum alasan seluruh informan dalam memilih rusunawa.

Tabel 1 Alasan Memilih Tinggal di Rusunawa

Informan	Sumber informasi	Alasan memilih
DK	Orang tua	Sewa kontrak habis Rusunawa lebih terjangkau
LH	Ketua RT tempat tinggal asal	Belum memiliki tempat tinggal Rusunawa lebih terjangkau
MSL	Teman dan saudara	Rusunawa lebih terjangkau
UM	Ketua RT tempat tinggal asal	Rusunawa lebih terjangkau
KLF	Saudara	Rusunawa lebih terjangkau
MRW	Ketua RT tempat tinggal asal	Rusunawa lebih terjangkau
DS	Saudara	Rusunawa lebih terjangkau
DN	Saudara	Rusunawa lebih terjangkau
FF	Saudara	Rusunawa lebih terjangkau
RD	Ketua RT tempat tinggal asal	Rusunawa lebih terjangkau

Latar belakang memilih rusunawa pada informan tersebut di atas dapat digambarkan dalam bentuk berikut ini.



Gambar 1. Alur Latar Belakang Memilih Rusunawa

Pada tahap mencari informasi mengenai rusunawa, informan cenderung memiliki standar dari unsur ekonomi yakni harga yang murah dan terjangkau. Para warga huni belum mencari informasi mengenai budaya tinggal di rusunawa sebagai hunian vertikal dengan pemanfaatan sarana serta prasarananya yang bersifat kepemilikan bersama.

Setelah memahami latar belakang warga huni memilih Rusunawa Buring sebagai tempat tinggalnya, langkah selanjutnya adalah menguraikan mengenai persepsi rusunawa yang ideal menurut informan. Pada langkah ini, nampak warga huni memberikan gambaran infrastruktur dan juga lingkungan sosial sebagai ciri rusunawa dapat dijadikan sebagai tempat tinggal yang ideal. Persepsi ini muncul dikarenakan adanya nilai dan kebutuhan yang diterjemahkan oleh warga huni.

Pada faktor fisik bangunan, beberapa kajian memperlihatkan bahwa perasaan sejahtera dalam menghuni dapat muncul karena beberapa faktor diantaranya adalah rasa aman (Mohit, Ibrahim & Rashid, 2010), privasi dan desain ruang (Day, 2000), ukuran ruangan dan lamanya bertempat tinggal (Fang, 2006; Berkosz, Turk & Kellekci, 2009). Temuan di lapangan menunjukkan warga huni mengeluhkan adanya kebocoran, air yang merembes, saluran sanitasi yang buntu, pelayanan pengelola rusunawa yang dirasakan lamban dalam menyelesaikan masalah, serta seluruh informan yang memberikan keluhan tidak adanya lembaga RT dan RW di rusunawa sehingga warga huni kesulitan (harus mengurus ke tempat tinggal asal) untuk mengurus keperluan yang memerlukan syarat administratif.

Seperti yang disampaikan MSL berikut ini, “....Kamar mandi bocor dari atas” (MSL.HWB.60).

RD juga menyampaikan keluhan yang sama dengan MSL, “....keluh kesahnya ya cuma itu lho mas, kamar mandinya sering bocor” (RD.HWB.70-71).

Pada pelayanan prima pengelola, informan memberikan ungkapan sebagai berikut, “....untuk pelaporan misalnya kita ada kebocoran apa ya.. rembes-rembes, itu mungkin pelayanannya lama..” (UM.HWB.47-49).

DK juga memberikan pendapat yang sama untuk persoalan pelayanan pengelola rusunawa

“...lek kebutuhannya ya standar aja, cuman ya kalau ada keluhan itu kadang ya agak lama tersampaikan (terselesaikan)” (DK.HWB.141-143)

Selain itu, DN juga mengatakan tentang peraturan yang tidak jelas penerapannya, seperti uraiannya berikut ini,

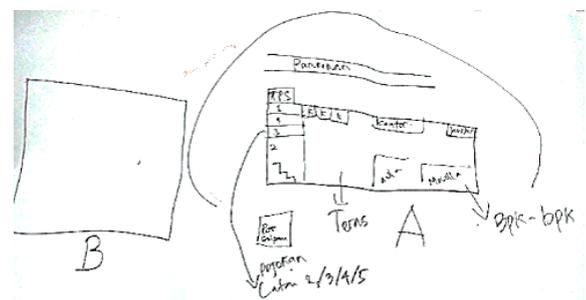
“...Ya ada sih petugasnya, ya gak tau lah ya tapi ada orang yang anu gak suka sama kita, ternyata kok yang lain masih ada yang jualan di luar” (DN.HWB.105-107)

Masalah lain yang menjadi hambatan informan yang merupakan warga huni Rusunawa Buring untuk merasa sejahtera adalah belum adanya sistem RT dan RW di Rusunawa Buring. Hal ini membuat warga merasa kesulitan mendapatkan bantuan, mengurus ke-administrasi-an, dan rasa memiliki hunian. Seperti yang disampaikan oleh KLF berikut ini,

“.....kalau saya misal didirikan rt atau rw itu kan belum ada, masi mengikuti kk lama, jadi kalau mau bikin surat harus ketempat asal” (KLF.HWB.143-147).

Berdasarkan temuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa selain faktor fisik bangunan, faktor sistem tinggal dapat menjelaskan gambaran kualitas hunian secara menyeluruh dan memberikan makna tersendiri mengenai persepsi rusunawa ideal bagi warga huni. Sementara itu, pada hasil diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion*) yang telah dilakukan dengan penghuni rusunawa, diketahui bahwa penggunaan ruang yang ada cukup beragam, berikut merupakan pemetaan penggunaan ruang di Rusunawa Buring menurut penghuni.

Penggunaan ruang oleh penghuni rusunawa blok A cenderung lebih beragam dari blok B. Ini dikarenakan sebagian besar fasilitas umum rusunawa berada di blok A. Fasilitas tersebut diantaranya adalah musholla, ruang pengawas, aula, pos satpam, dan toko. Berikut merupakan peta kognitif penggunaan tempat tinggal yang digambarkan oleh warga huni Blok A.



Gambar 2. Peta Kognitif Warga Huni Blok A
Sumber: Peneliti, 2018

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa setiap lantai memiliki ruang-ruang khusus yang digunakan ibu-ibu untuk berkumpul. Sedangkan bapak-bapak lebih banyak menghabiskan waktu di musholla atau di teras dekat aula. Anak-anak memiliki ruang yang paling bebas dikarenakan tidak tersedianya arena bermain anak-anak, maka mereka cenderung menggunakan koridor untuk bermain atau beraktivitas.

Namun, berbeda dengan Blok B. Kondisi ruang yang ada pada blok B lebih sederhana karena hampir seluruhnya merupakan unit hunian. Berikut merupakan hasil peta kognitif warga huni yang tinggal pada blok B.



Gambar 3. Peta Kognitif Warga Huni Blok B

Sumber: Peneliti, 2018

Berdasarkan gambar tersebut di atas, dapat dimaknai bahwa warga huni blok B cenderung memiliki kesamaan dengan warga huni blok A. Warga huni ibu rumah tangga cenderung menghabiskan waktunya untuk berkumpul pada ruang setiap lantai. Selain itu, aktivitas ibu rumah tangga juga kerap dilakukan di ruang terbuka bagian belakang blok B. Aktivitas ini lebih bersifat menjalin relasi sosial dengan “rujukan” bersama. Sementara itu, bagi laki-laki yang berfungsi sebagai kepala keluarga cenderung mengelompok dengan warga huni blok A dengan melakukan ragam aktivitas di musholla. Namun tidak demikian dengan anak-anak yang tinggal di Blok A. Anak-anak yang tinggal di Blok B cenderung melakukan aktivitas di luar bangunan hunian yakni di halaman rusunawa atau di dekat ruang parkir bagian belakang.

Melihat hasil tersebut, kelayakan infrastruktur fungsional unit hunian serta sistem tinggal merupakan ciri yang disampaikan warga huni sebagai syarat bentuk rusunawa yang ideal. Warga huni memberikan persepsi positif dan negatif pada keadaan infrastruktur dan sistem tinggal Rusunawa Buring. Persepsi positif diberikan warga huni untuk harga hunian yang relatif terjangkau, sedangkan persepsi negatif diberikan warga huni untuk pelayanan infrastruktur dan sistem tinggal.

Persepsi ini timbul karena warga huni memiliki faktor nilai, kebutuhan, serta pengalaman sebelumnya. Hasil tersebut di atas menunjukkan bahwa warga huni Rusunawa Buring memerlukan kebutuhan berafiliasi. Hal ini ditandai dengan digunakannya lorong unit dan musholla untuk aktivitas relasi sosial. Kebutuhan ini menekankan makna guyub, dan rukun di Rusunawa Buring. Pada persepsi negatif, warga huni memberikan penilaian tidak memuaskan akan sistem tinggal yang tidak memiliki Rukun Warga dan atau Rukun Tetangga. Kebutuhan ini diperlukan agar warga huni mudah dalam mengurus kebutuhan yang berkaitan dengan administrasi dan pengakuan tinggal.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa persepsi warga huni tentang Rusunawa Buring yang ideal adalah hunian vertikal dengan sistem tinggal dan infrastruktur yang baik. Persepsi warga huni Rusunawa Buring berangkat dari pengalaman tinggal sebelumnya di rumah tapak, serta adanya nilai dan kebutuhan kolektivisme yang masih dipertahankan. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa guyub, rukun, dan tertib menjadi indikator utama memunculkan persepsi rusunawa ideal. Temuan ini dapat dijadikan indikator evaluasi sistem tinggal yang dilakukan secara berkala pada elemen fungsional, teknis, dan perilaku di Rusunawa Buring.

Referensi

- 1) Day, L.L. (2000). Choosing a house: The relationship between dwelling type, perception of privacy and residential satisfaction. *Journal of Planning Education and Research*, 19, 265-275
- 2) Fang, Y. (2006). Residential satisfaction, moving intention and moving behaviors : a study of redeveloped neighborhood in inner-city Beijing. *Housing Studies*, 21, 671-694
- 3) Irwanto. (2002). Psikologi Umum. PT. Prenhallindo. Jakarta.
- 4) KBBI, (2016). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Online] Available at: <http://kbbi.web.id/pusat>, [Diakses 21 Juni 2016]
- 5) Mamassian, Pascal (2008). Ambiguities and conventions in the perception of visual art. *Visual Research*. Vol 48, 2143-215

HUBUNGAN PENGEMBANGAN KAWASAN BISNIS DAN PARIWISATA TERPADU DI KOTA MAKASSAR TERHADAP KAWASAN PESISIR KECAMATAN GALESONG UTARA KABUPATEN TAKALAR

Khairul Fuady¹, Fadhil Surur²

^{1,2}) Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota

^{1,2}) UIN Alauddin Makassar

²) fadhil.surur@uin-alauddin.ac.id

Abstract

Integrated business and tourism development in Makassar was an effort to utilize the potentials of the region in supporting the development activities. One of the areas that identified as having influence activities from the business and tourism area in Makassar City was North Galesong District. The area was located in the north and was approximately 27 kilometers from the capital of Takalar Regency. North Galesong District was one of the connecting routes to Akkarena Beach which was an alternative route for people from and headed to Makassar City. This study was aim to determine the relationship between the development of integrated business and tourism area in Makassar City and the coastal area in North Galesong District. Correlation analysis test was used to determine the effect of the development program. The pond, the number of fisherman, trade services and facilities, as well as road infrastructure were used as parameter. This study showed that the relationship between trade facilities and services and road infrastructure gave a positive contribution. The development of trade service activities and the increase in the length of roads were closely linked to the development of integrated business and tourism areas in Makassar City.

Keywords: business, tourism, coastal

Abstrak

Pengembangan bisnis dan pariwisata terpadu di Kota Makassar merupakan salah satu upaya untuk memanfaatkan segala potensi kawasan dalam menunjang kegiatan pengembangan. Salah satu wilayah yang teridentifikasi memiliki aktivitas pengaruh dari kawasan bisnis dan pariwisata Kota Makassar adalah Kecamatan Galesong Utara, wilayahnya terletak di sebelah utara dan berjarak kurang lebih 27 kilometer dari ibu kota Kabupaten Takalar. Kecamatan Galesong Utara merupakan salah satu jalur penghubung menuju Pantai Akkarena yang menjadi rute alternatif masyarakat dari dan menuju Kota Makassar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara pengembangan kawasan bisnis dan pariwisata terpadu Kota Makassar terhadap kawasan pesisir Kecamatan Galesong Utara. Untuk mengetahui pengaruh pengembangan digunakan analisis uji korelasi dengan 4 parameter yaitu lahan tambak, jumlah nelayan, sarana perdagangan dan jasa serta prasarana jalan. Hasil dari penelitian ini bahwa diperoleh hubungan antara sarana perdagangan/jasa dan prasarana jalan memberikan kontribusi yang positif. Perkembangan aktivitas perdagangan/jasa dan peningkatan panjang jalan berhubungan erat dari kegiatan pembangunan kawasan bisnis dan pariwisata terpadu di Kota Makassar.

Kata Kunci : bisnis, wisata, pesisir

Pendahuluan

Kawasan pesisir dikenal sebagai ekosistem perairan yang memiliki potensi sumberdaya yang sangat besar. Sumberdaya alam pesisir merupakan salah satu sumberdaya alam yang terdapat di Indonesia dan memiliki potensi tinggi untuk dikembangkan. Wilayah pesisir telah banyak dimanfaatkan dan memberikan sumbangan yang berarti bagi peningkatan taraf hidup masyarakat di kawasan pesisir. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan peningkatan kegiatan pembangunan sosial ekonomi wilayah pesisir terus bertambah. Konsekuensi dari tekanan terhadap pesisir ini adalah masalah pengelolaan yang timbul karena berbagai kepentingan yang ada di wilayah pesisir (Purnamasari, 2015).

Pariwisata merupakan suatu bidang yang potensial dalam pembangunan suatu Negara. Daerah dengan potensi pariwisata dapat menghidupkan kegiatan ekonomi masyarakat sekitar dengan timbulnya usaha-usaha skala kecil sampai menengah, mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan kembali digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan pembangunan di daerah dan mencapai kesejahteraan (Riyaningtyas, 2014). Kawasan pesisir Kota Makassar yang memiliki arti strategis untuk pengembangan wisata bahari karena berbatasan langsung dengan Selat Makassar, sehingga memiliki potensi sumberdaya alam (pantai berpasir atau mangrove) dan jasa-jasa

lingkungan yang berpotensi untuk pengembangan wisata bahari seperti potensi wisata pantai, wisata mangrove, wisata budaya, dan wisata sejarah yang beragam, menarik dan cukup terkenal. Jenis wisata yang dikembangkan saat ini di kawasan pesisir dan laut Kota Makassar secara langsung adalah: wisata Pantai Losari, Pantai Akkarena, Pantai Tanjung Bunga, dengan kegiatan wisata seperti berperahu, berenang, memancing serta olahraga pantai, berjemur, dan piknik menikmati atmosfer laut. Wisata theme park dan out bound yang ada disini adalah di Trans Studio dan Pantai Akkarena (DKP Kota Makassar 2010; Dinas Pariwisata Kota Makassar, 2010).

Salah satu wilayah yang teridentifikasi memiliki aktivitas pengaruh dari wisata Pantai akkarena adalah Kecamatan Galesong Utara, wilayahnya terletak di sebelah utara dan berjarak kurang lebih 27-kilometer dari ibu kota Kabupaten Takalar. Kecamatan Galesong Utara merupakan salah satu jalur penghubung menuju Pantai Akkarena. Sehingga menjadi rute alternatif masyarakat dari dan menuju Kota Makassar. Dampak yang ditandai dengan perubahan penggunaan lahan, peningkatan aktivitas masyarakat hingga isu-isu kerusakan lingkungan.



Gambar 1. Kawasan bisnis dan pariwisata terpadu

Kondisi tersebut menyebabkan kawasan Bisnis dan Pariwisata Terpadu Kota Makassar semakin didorong untuk meningkatkan kualitas kawasan dengan pembangunan dan perbaikan sarana serta prasarana penunjang wisata. Di sisi lain peran serta masyarakat dan pemerintah sangat diperlukan untuk menjaga kelestarian lingkungan objek pariwisata dengan pengoptimalan perawatan lingkungan dan pengawasan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pengaruh dan strategi pengembangan kawasan bisnis dan pariwisata terpadu Kota Makassar terhadap kawasan Pesisir Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dan menyusun strategi pengembangan kawasan bisnis dan pariwisata terpadu Kota Makassar terhadap kawasan pesisir Kecamatan Galesong Utara

Metode Penelitian

Lokasi objek penelitian penulis yaitu Kawasan Bisnis dan Pariwisata Terpadu Kota Makassar dan Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar.

Lokasi tersebut merupakan Kawasan wisata di Kota Makassar yang memiliki potensi baik dari segi fisik, aksesibilitas, partisipasi masyarakat serta sarana dan prasarana daya tarik wisata. Adapun waktu penelitian dilakukan pada bulan Oktober hingga November 2017.

Teknik pengumpulan data mencakup observasi lapangan, kuesioner, wawancara, metode insasional dan telaah pustaka. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu menurut Sugiyono (2001) menyatakan bahwa sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Jumlah masyarakat yang akan dijadikan informan dalam penelitian adalah menggunakan pendekatan purposive sampling yaitu sebanyak 10 orang dalam hal ini peneliti memilih sampel orang-orang yang terlibat langsung dengan dunia pariwisata dan pesisir dalam jangka waktu yang cukup lama, terlibat dalam bidang tata ruang, memiliki pengetahuan terkait lokasi penelitian dan pernah mengunjungi lokasi penelitian. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: Pihak pemerintah (Dinas Kelautan dan Perikanan, Bappeda, dan Dinas Pariwisata), Akademisi (Dosen dengan bidang terkait), dan masyarakat sekitar.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis uji korelasi yang merupakan salah satu cara untuk mengkaji keterkaitan antara faktor yang berpengaruh antara koefisien korelasi (r). Analisis ini digunakan untuk menjawab tujuan penelitian pertama (pengaruh kawasan bisnis dan pariwisata terpadu terhadap kawasan pesisir). Rumus umum dari uji korelasi yaitu :

$$r = \frac{N \cdot \sum xy - \sum x \cdot \sum y}{\sqrt{[N \cdot \sum x^2 - (\sum x)^2][N \cdot \sum y^2 - (\sum y)^2]}}$$

Keterangan :

N = Jumlah perlakuan (pengambilan data)

X 1 = lahan tambak

X 2 = nelayan

X 3 = perdagangan dan jasa

X 4 = jalan

Y 1 = lahan terbangun

Dengan Asumsi

- Jika r = 0 atau mendekati 0, maka hubungan antara kedua variabel sangat lemah atau tidak ada pengaruh.
- Jika r mendekati 0,5 maka hubungan kedua variabel sedang atau berpengaruh.
- Jika r = 0,5 atau mendekati 1 maka hubungan kedua variabel sangat kuat atau sangat berpengaruh

Hasil dan Pembahasan

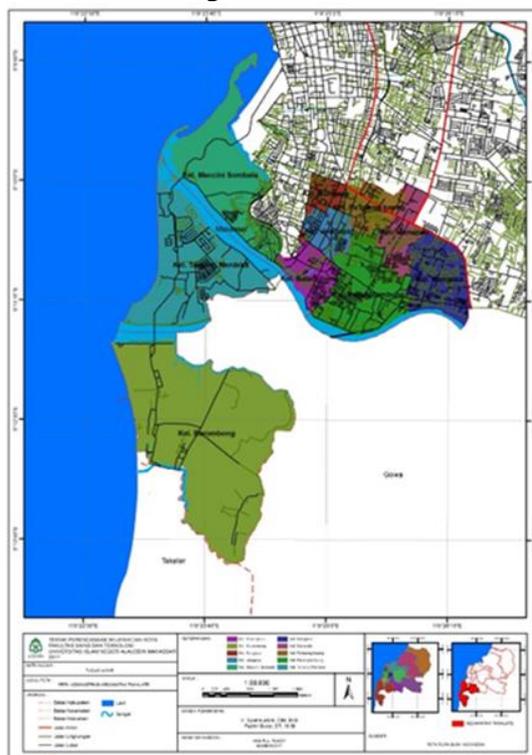
Penggunaan Lahan Pada Tahun 2000

Kota Makassar secara administratif berkedudukan sebagai Ibu Kota Provinsi Sulawesi

Selatan dan sebagai pusat perkembangan dan pelayanan pembangunan. Secara geografis Kota Makassar selain sebagai pusat pengembangan dan pelayanan pembangunan di kawasan Timur Indonesia dengan ketinggian yang bervariasi antara 0 – 25 M dari permukaan laut, dengan suhu udara antara 22° C sampai dengan 32° C dan curah hujan antara 2000–3000 mm dengan hari hujan rata-rata 108 hari pertahun. Adapun batas-batas administrasi Kota Makassar sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkajene Kepulauan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan dengan Kabupaten Gowa.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar

Kawasan bisnis dan pariwisata terpadu Kota Makassar direncanakan dalam wilayah di wilayah Tanjung Bunga Kecamatan Tamalate. Pelaksanaan kawasan ini diarahkan berdasarkan ketetapan dalam Perda Nomor 6 Tahun 2006 Tentang RTRW, oleh karena dari tiga usaha bisnis dan pariwisata (bisnis karamba, akarena, dan tanaman hias). Berdasarkan perkembangan di kawasan bisnis dan pariwisata terpadu di Kota Makassar berdampak langsung terhadap wilayah di sekitarnya salah satunya Kecamatan Galesong Utara.

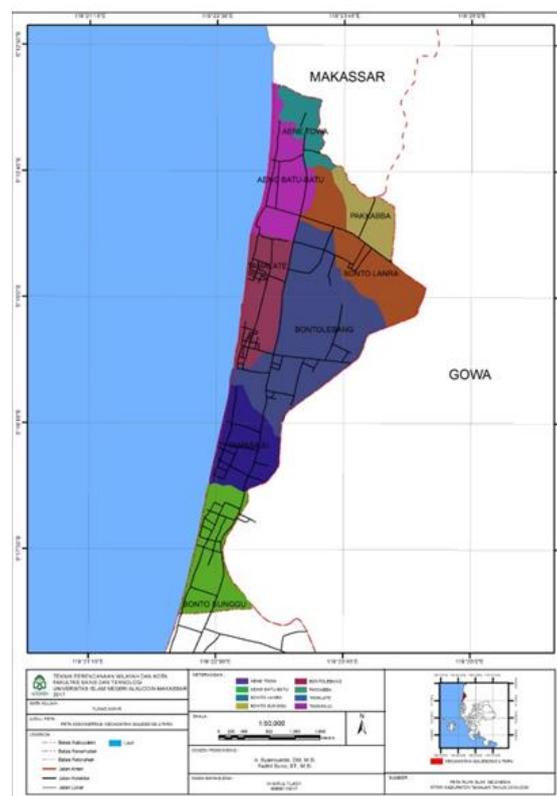


Gambar 2. Peta Kecamatan Tamalate

Perkembangan kawasan bisnis dan pariwisata terpadu membuka jalur atau akses alternatif dari Kecamatan Galesong Utara di Kabupaten Takalar dari dan menuju Kota Makassar. Dampak nyata dari pengaruh aktivitas bisnis adalah berubahnya kondisi sebagian besar wilayah Kecamatan Galeong Utara menjadi lahan terbangun. Rentang tahun 2014 – 2015 tidak terjadi penambahan luasan lahan, dimana masih tetap pada angka 877,61 ha,

sedangkan pada tahun 2016 terjadi penambahan luasan menjadi 878,32 ha. Pertambahan lahan terbangun dimanfaatkan untuk kegiatan permukiman, perdagangan jasa dan pariwisata sebagai dampak dari kegiatan pengembangan kawasan bisnis dan pariwisata terpadu di Kota Makassar.

Galesong Utara sebagai salah satu kecamatan yang terletak disebelah utara dan berjarak kurang lebih 27 kilometer dari ibukota Kabupaten Takalar. Ibu kota Kecamatan Galesong Utara terletak di Kelurahan Bontolebang yang sebelah utara berbatasan dengan Kota Makassar, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gowa, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Galesong dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar. Luas Wilayah Kecamatan Galesong Utara sekitar 15,11 km² atau sebesar 2,67 persen dari total Kabupaten Takalar yang memiliki 9 desa dan 1 kelurahan.



Gambar 3. Peta Kecamatan Galesong Utara

Jumlah penduduk Kecamatan Galesong Utara pada tahun 2016 sekitar 39.228 jiwa, yang terdiri dari 19.210 laki-laki dan 20.018 jiwa perempuan. Dari jumlah tersebut, Kelurahan Bonto Lebang adalah terbesar jumlah penduduknya sekitar 5.743 jiwa dan Desa yang paling kecil jumlah penduduknya adalah Desa Bonto Kaddopepe sekitar 1.580 jiwa.

Hubungan Terhadap Budidaya Perikanan

Kawasan budidaya perikanan yang diusahakan oleh masyarakat setempat berupa kegiatan pertambakan. Luas lahan tambak pada tahun 2016 mengalami penurunan dibandingkan dengan lahan tambak pada tahun 2015. Hubungan perkembangan lahan terbangun terhadap kegiatan budidaya perikanan ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hubungan keterkaitan antara kawasan budidaya tambak dengan dampak pembangunan kawasan bisnis dan wisata terpadu

Tahun	Tambak (ha)	Lahan Terbangun (ha)	x ²	y ²	xy
	(x)	(y)			
2014	156	877.61	24336	770199.31	136907.16
2015	156	877.61	24336	770199.31	136907.16
2016	146	878.32	21316	771446.02	128234.72
Jumlah	458	2633.54	69988	2311844.6	402049.04

Sumber : hasil analisis, 2018

Diketahui:

$$\begin{aligned}
 N &= 3 \\
 \sum x &= 458 \\
 \sum y &= 2.633,54 \\
 \sum xy &= 402.049,04 \\
 \sum x^2 &= 69.988 \\
 (\sum x)^2 &= 209.764 \\
 \sum y^2 &= 2.311.844,647 \\
 (\sum y)^2 &= 6.935.532,9316
 \end{aligned}$$

Penyelesaian:

$$r = \frac{N \cdot \sum xy - \sum x \cdot \sum y}{\sqrt{[N \cdot \sum x^2 - (\sum x)^2][N \cdot \sum y^2 - (\sum y)^2]}}$$

$$r = \frac{141,0644534}{-14.2}$$

$$r = -1.006632051$$

Dari hasil analisis uji korelasi kawasan budidaya perikanan terhadap lahan terbangun di Kecamatan Galesong Utara diperoleh nilai r adalah -1.006632051 maka menunjukkan tidak ada hubungan. Sehingga dapat diinterpretasikan bahwa pengembangan kawasan bisnis dan wisata terpadu di Kota Makassar tidak memiliki kaitan dengan berkurangnya lahan tambak di Kecamatan Galesong Utara.



Gambar 4. Lahan tambak

Pengaruh Terhadap Jumlah Nelayan

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan setempat diperoleh data berdasarkan mata pencaharian yang berkaitan langsung dengan aktivitas pesisir yaitu nelayan. Jumlah nelayan di Kecamatan Galesong Utara nampak mengalami penurunan, dari 17.340 jiwa di tahun 2015 menjadi 15.547 jiwa di tahun 2016. Hubungan

perkembangan lahan terbangun terhadap kegiatan jumlah nelayan ditampilkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hubungan keterkaitan antara jumlah nelayan dengan dampak pembangunan kawasan bisnis dan wisata terpadu

Tahun	Nelayan	Lahan Terbangun (ha)	x ²	y ²	xy
	(x)	(y)			
2014	16.959	877.61	287607681	770199.31	14883387.99
2015	17.340	877.61	300675600	770199.31	15217757.4
2016	15.547	878.32	241709209	771446.02	13655241.04
Jml	49.846	2633.54	829992490	2311844.6	43756386.43

Sumber : hasil analisis, 2018

Diketahui:

$$\begin{aligned}
 N &= 3 \\
 \sum x &= 49.846 \\
 \sum y &= 2.633,54 \\
 \sum xy &= 43.756,38643 \\
 \sum x^2 &= 829,99249 \\
 (\sum x)^2 &= 2.484,62372 \\
 \sum y^2 &= 2.311.844,647 \\
 (\sum y)^2 &= 6.935.532,9316
 \end{aligned}$$

Penyelesaian:

$$r = \frac{N \cdot \sum xy - \sum x \cdot \sum y}{\sqrt{[N \cdot \sum x^2 - (\sum x)^2][N \cdot \sum y^2 - (\sum y)^2]}}$$

$$r = \frac{2313.817839}{-2275.55}$$

$$r = -0.98346117$$

Dari hasil analisis uji korelasi jumlah nelayan terhadap lahan terbangun dimana nilai r adalah -0.98346117 maka menunjukkan tidak saling berhubungan. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa tidak ada keterkaitan antara dampak pembangunan kawasan bisnis dan wisata terpadu terhadap jumlah orang yang bekerja sebagai nelayan di Kecamatan Galesong Utara. Mereka tetap beraktivitas mengelola lahan yang tersisa sebagai kegiatan budidaya perikanan.



Gambar 5. Aktivitas masyarakat nelayan

Hubungan Terhadap Perdagangan dan Jasa

Berdasarkan hasil observasi di lapangan maka diperoleh data jumlah sarana perdagangan dan jasa di Kecamatan Galesong Utara mengalami kenaikan yang cukup tinggi dari 803 di tahun 2014, 861 di tahun 2015, menjadi 864 di tahun 2016. Hubungan keduanya disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hubungan keterkaitan antara perdagangan dan jasa dengan dampak pembangunan kawasan bisnis dan wisata terpadu

Tahun	Jumlah	Lahan	x ²	y ²	xy
		Terbangun (ha)			
	(x)	(y)			
2014	803	877.61	644809	770199.31	704720.83
2015	861	877.61	741321	770199.31	755622.21
2016	864	878.32	746496	771446.02	758868.48
Jml	2528	2633.54	2132626	2311844.6	2219211.52

Sumber : hasil analisis, 2018

Diketahui:

$$\begin{aligned}
 N &= 3 \\
 \sum x &= 2.528 \\
 \sum y &= 2.633.54 \\
 \sum xy &= 2.219.211,52 \\
 \sum x^2 &= 2.132.626 \\
 (\sum x)^2 &= 6.390,784 \\
 \sum y^2 &= 2.311.844,647 \\
 (\sum y)^2 &= 6.935.532,9316
 \end{aligned}$$

Penyelesaian:

$$r = \frac{N \cdot \sum xy - \sum x \cdot \sum y}{\sqrt{[N \cdot \sum x^2 - (\sum x)^2][N \cdot \sum y^2 - (\sum y)^2]}}$$

$$r = \frac{84.21990145}{45.44}$$

$$r = 0.539539933$$

Dari hasil analisis uji korelasi jumlah sarana perdagangan dan jasa dan dampak pengembangan kawasan bisnis dan wisata terpadu di Kota Makassar diperoleh nilai r adalah 0.539539933 maka menunjukkan pengaruh yang kuat. Semakin meningkatnya luas lahan terbangun sebagai dampak dari kawasan bisnis dan pariwisata terpadu maka semakin tinggi pula aktivitas perdagangan dan jasa di Kecamatan Galesong Utara.



Gambar 6. Perdagangan/jasa

Hubungan Terhadap Prasarana Jalan

Prasarana jalan di Kecamatan Galesong Utara mengalami penambahan total panjang jalan, dari 85.37 km di tahun 2014-2015 menjadi 91.16 km di tahun 2016. Perkembangan prasarana jalan dihitung berdasarkan jumlah panjang pertambahan jalan yang dibangun di Kecamatan Galesong Utara. Hubungan antara perkembangan lahan terbangun terhadap prasarana jalan disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Hubungan keterkaitan antara prasarana jalan dengan dampak pembangunan kawasan bisnis dan wisata terpadu

Tahun	Jalan	Lahan	x ²	y ²	xy
	(km)	Terbangun (ha)			
	(x)	(y)			
2014	85.37	877.61	7288.03	770199.31	74921.56
2015	85.37	877.61	7288.03	770199.31	74921.56
2016	91.16	878.32	8310.14	771446.02	80067.65
Jumlah	261.9	2633.54	22886.21	2311844.6	229910.78

Sumber: hasil analisis, 2018

Diketahui:

$$\begin{aligned}
 N &= 3 \\
 \sum x &= 261.9 \\
 \sum y &= 2633.54 \\
 \sum xy &= 2.299.10,7826 \\
 \sum x^2 &= 2.288.6,2194 \\
 (\sum x)^2 &= 68.591,61 \\
 \sum y^2 &= 2.311.844,647 \\
 (\sum y)^2 &= 6.935.532,9316
 \end{aligned}$$

Penyelesaian:

$$r = \frac{N \cdot \sum xy - \sum x \cdot \sum y}{\sqrt{[N \cdot \sum x^2 - (\sum x)^2][N \cdot \sum y^2 - (\sum y)^2]}}$$

$$r = \frac{8.126499862}{8.2218}$$

$$r = 1.011727083$$

Dari hasil analisis uji korelasi prasarana terhadap kawasan pesisir galesong utara dimana nilai r adalah 1.011727083 maka menunjukkan pengaruh yang sangat kuat. Semakin berkembangnya kawasan bisnis dan wisata terpadu di Kota Makassar maka semakin tinggi pula pertambahan panjang jalan di Kecamatan Galesong Utara.



Gambar 7. Kondisi jalan di lokasi penelitian

Berdasarkan 4 variabel yang diukur dapat dirangkum bahwa, variabel yang sangat berpengaruh

adalah variabel sarana perdagangan/jasa dengan nilai 0,53 dan prasarana jalan dengan nilai 1,1. Berdasarkan asumsi jika $r = 0,5$ atau mendekati 1 maka hubungan kedua variabel sangat kuat atau sangat berpengaruh. Sehingga diindikasikan bahwa pengembangan kawasan bisnis dan wisata terpadu berkaitan dengan adanya penambahan unit sarana perdagangan/jasa dan penambahan panjang jalan.

Tabel 5. Rekapitulasi hubungan 4 variabel kawasan pesisir dengan dampak pembangunan kawasan bisnis dan wisata terpadu

No	Variabel	Hasil Analisis	Keterangan
1	Kawasan Budidaya Perikanan	-1.006632051	Tidak ada pengaruh
2	Jumlah Nelayan	-0.98346117	Tidak ada pengaruh
3	Sarana perdagangan dan Jasa	0.539539933	Sangat Berpengaruh
4	Prasarana Jalan	1.011727083	Sangat Berpengaruh

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan uji korelasi dari 4 variabel yang diukur dapat diinterpretasikan bahwa antara variabel luas lahan tambak, jumlah nelayan, jumlah sarana perdagangan/jasa dan jumlah panjang jalan, hanya jumlah sarana/jasa serta panjang jalan yang memiliki hubungan yang kuat antara dampak pengembangan kawasan wisata dan bisnis di Kota Makassar terhadap kawasan pesisir di Kecamatan Galesong Utara. Hal ini juga menunjukkan bahwa semakin cepatnya terjadi perkembangan kota, tidak mempengaruhi karakter masyarakat setempat sebagai masyarakat nelayan. Walaupun terjadi perubahan fisik di lingkungan mereka

Daftar Pustaka

- Yoeti. Oka. Edisi Revisi 1996. Pengantar Ilmu Pariwisata. Bandung: Penerbit Angkasa
- Ali, Da'faf. 2004. Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Pantai sebagai Obyek Wisata dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Lokasi Wisata (Studi Kasus di Kawasan Wisata Pantai Kartini Jepara). Tesis. Program Studi Magister Manajemen Sumberdaya Pantai. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Alim Sumarno. 2012. Perbedaan Penelitian dan Pengembangan
- Alister Mathieson and Geoffrey Wall. 1982. *Tourism: Economic, Physical and Social Impact*. New York. Longman Scientific and Technical
- Dahuri. R. 1993. Daya Dukung Lingkungan dan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan. Paper
- Dinas Pariwisata Kota Makassar. *RIPPPDA Kota Makassar 2015-2035*. Makassar: Dinas Pariwisata Kota Makassar, 2015.
- Djunaedi, Achmad. 2011. Perencanaan Pengembangan Kawasan Pesisir. *Jurnal Teknologi Lingkungan* 3.3.
- Fahmi. Irham. 2013. *Manajemen Strategis Teori dan Aplikasi*. Cetakan 1. Bandung: ALFABETA.
- Greenwood. C.T. 1976. Starch di dalam Y. Pomeranz. *Advances in Cereal Science and Technology*. AACC. Minnesota.
- Gunn. A. Clare. 1994. *Tourism Planning: Basics*. Conc epts. Cases/Third Edition. Taylor & Francis Ltd. UK.
- Hardianti. 2014. Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Bisnis dan Pariwisata Terpadu Berdasarkan RT/RW Kota Makassar. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Idha, Wijaya, Nirmalasari. 2007. *Analisis Kesesuaian Lahan dan Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya di Wilayah Pesisir Kabupaten Kutai Timur*. Tesis (Tidak dipublikasikan). Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- J.R. Brent Ritchie and Charles R. Goeldner (ed.). 1987. *Travel, Tourism and Hospitality Research*. New York. John Wiley and Sons Inc.
- K. Lubis, Suhrawardi dan Farid Wajdi. 2012. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mamang Sangadji. Etta dan Sopiah. 2010. *Metodologi Penelitian*. Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Marpaung. Happy dan Bahar Herman. 2002. *Pengantar Pariwisata*. Bandung : Alfabeta.
- Michael E. Porter. 2007. *Strategi Bersaing (competitive strategy)*. Tangerang: Kharisma Publishing Group.
- Pendit. Nyoman S. 2003. *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Purnamasari. L. 2009. Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu dan Berkelanjutan yang Berbasis Masyarakat. *Jurnal Lingkungan Hidup*.
- Rangkuti. Freddy (2004). *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Riyaningtyas. Mifta Damai. 2014. Strategi pengembangan daerah pesisir pantai sebagai objek pariwisata di kabupaten pacitan. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.
- Spillane. JJ. 1994. *Pariwisata Indonesia. Siasat Ekonomi dan Rekayasa Kebudayaan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Sugiyono 2001. *Metode Penelitian Administrasi*. Penerbit Alfabeta: Bandung.

- 24) Wiwoho. B.dkk. 1990. *Pariwisata Citra dan Manfaatnya*. Jakarta: PT. Bina Rena Pudjawati

PERENCANAAN PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA BANYUURIP DESA JATIMULYO, KECAMATAN DLINGGO, KABUPATEN BANTUL

Eka Widyaningsih
Program Studi Arsitektur, Universitas PGRI Yogyakarta
eka.widya.jpr@gmail.com

Abstract

The area of Jenon Water Source has been determined as tourism development area. This research is aimed to arrange the spatial development brief of Jenon Water Source. The method used in this research is descriptive qualitative method. The research result show that regional arrangement is needed. Where in the area arrangement in Sumber Jenon carried out in this project has a positive effect in Gunungronggo Village, which can improve the economy of the Gunungronggo Village community and improve the quality of Human Resources in Gunungronggo Village by adding a central souvenir in Sumber Jenon.

Keywords: Water Source, Improve The Economy, Tourism Development Area

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk mengembangkan potensi pariwisata dan konservasi lingkungan di Kawasan Wisata Banyuurip, Desa Jatimulyo, Kecamatan Dlinggo, Kabupaten Bantul. Sehingga Kawasan wisata ini dapat berkembang sebagai kawasan tujuan wisata yang kompetitif. Permasalahan yang ada di Kawasan Wisata Banyuurip adalah belum adanya penataan ruang yang komperhensif, belum atraktif dalam pengemasan atraksi pariwisata, dan belum maksimalnya SDM dalam pengelolaan Kawasan Wisata Banyuurip. Konsep pengembagn Kawasan Wisata Banyuurip, menggunakan pendekatan penataan ruang dan komponen pengembangan pariwisata 4A, yaitu; attraction, accessibility, amenity dan ancilliary

Kata kunci: Sumber Air, Perubahan Ekonomi, Pengembangan Area Pariwisata

Pendahuluan

Desa Jatinom, Kecamatan Dlinggo, Kabupaten Bantul, memiliki berbagai potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM). SDA Desa Jatinom antara lain: bentang alam perdesaan, sungai permukaan, dan juga sumber mata air yang disebut Sendang Banyuurip atau Sendang Penguripan. Sedangkan potensi SDM, antara lain kerajinan-kerajinan dan seni budaya yang berkembang di Desa Dlinggo.

Sendang Banyuurip ini terkait erat dengan Legenda Sunan Geseng atau Jebeng Cokro Joyo, yang merupakan salah satu murid Sunan Kalijaga. Dan berdasarkan cerita juru kunci, Sendang Banyuurip ini pernah dipakai untuk mandi oleh GPH Mangkubumi

Selain Sendang Banyuurip, peninggalan lain dari Sunan Geseng adalah Jati Kluwih dan Watu Sego, dan juga kawasan sungai Oyo. Berdasarkan survey lapangan, Kawasan Wisata Banyuurip, terutama Sendang Banyuurip ini selalu dikunjungi oleh wisatawan. Pengunjung akan mencapai puncaknya pada malam Selasa Kliwon dan Jum'at Kliwon.

Pengembangan potensi Kawasan Wisata Banyuurip sebagai kawasan wisata didukung potensi wisata daerah sekitar yang terlebih dahulu sudah tertata dan dikenal oleh masyarakat luas. Kawasan wisata tersebut antara lain; wisata, seperti

Puncak Becici, Hutan Pinus, Bukit Bintang, Hutan Turunan, dan Air terjun Sri Gethuk.

Sektor pariwisata menjadi salah satu potensi yang dikembangkan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY menegaskan pengakuan negara terhadap kekhasan/keistimewaan yang dimiliki DIY. Kewenangan keistimewaan DIY yang terkait dengan kepariwisataan meliputi kebudayaan, pertanahan dan tata ruang. Dan merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 menempatkan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor strategis. Hal ini dikarenakan sektor pariwisata memberikan dampak berantai terhadap perekonomian daerah. Kegiatan kepariwisataan diharapkan dapat membantu peningkatan pendapatan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Pengembangan destinasi pariwisata difokuskan pada pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dan peningkatan daya tarik serta pelayanan pariwisata. Pada bagian program bidang Pariwisata, disebutkan antara lain :

- a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata,

- b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata,
- c. Program Pengembangan Kemitraan.

Ruang Lingkup Pembangunan Kepariwisata meliputi pembangunan industri pariwisata; pembangunan destinasi pariwisata; pembangunan pemasaran pariwisata, pembangunan kelembagaan pariwisata dan pembangunan ekosistem pariwisata.

Keterlibatan dan peran serta pemerintah maupun masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan pengembangan pariwisata. RPJMD Kabupaten Bantul melalui 2016-2021 telah merumuskan program terkait pemberdayaan masyarakat melalui program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa.

Potensi-potensi di Kawasan Banyuurip belum dikembangkan secara maksimal, dan kendala utama Kawasan Banyuurip untuk menjadi tujuan wisata yang potensial antara lain;

- a. Belum adanya penataan ruang yang komperhensif,
- b. Belum atraktif dalam pengemasan atraksi pariwisata
- c. Belum maksimalnya SDM dalam pengelolaan Kawasan Wisata Banyuurip.

Kajian Pustaka

Kebijakan Tata Ruang Dan Tinjauan Pustaka

Perencanaan kawasan wisata, dengan tujuan kawasan tersebut menjadi salah satu ODTW yang berkelanjutan, maka diperlukan suatu konsep pengembangan yang jelas. Dalam bidang pariwisata banyak konsep yang menjadi landasan pengembangan perencanaan, salah satunya adalah Konsep 4A (attraction, accessibility, amenity dan ancilliary).

- a. *Attractiony*
Komponen yang signifikan yang menjadi daya tarik wisatawan. atraksi yang menarik kedatangan wisatawan itu ada tiga, yaitu 1) Natural Resources (alami), 2) Atraksi wisata budaya, dan 3) Atraksi buatan manusia itu sendiri.
- b. *Accessibility*
Menitik beratkan pada kemudahan isatawan dalam melakukan pergerakan dari satu tempat ke tempat lain dan kemudahan isatawan dalam mencapai kaasan wisata tersebut.
- c. *Amenity*
sarana dan prasarana yang diperlukan oleh wisatawan selama berada di daerah tujuan wisata. Sarana dan prasarana yang dimaksud seperti: penginapan, rumah makan, transportasi dan agen perjalanan
- d. *Anciliary*
Merupakan pelayanan yang harus disediakan oleh pemangku kebijakan atau pemerintah dalam penyediaan infrastruktur di kawasan wisata. Selain itu, yang termasuk anciliary

adalah lembaga pengelolaan, Tourist Information, Travel Agent dan stakeholder yang berperan dalam kepariwisataan.

Kebijakan penataan ruang di Kawasan Sumur Banyuurip dilakukan secara terpadu dengan mempertimbangkan kondisi alamiah (lingkungan) serta buatan. Kebijakan penataan ruang di Kawasan Sumur Banyuurip dikembangkan ke dalam suatu kerangka kebijakan yang strategis. Arah Kebijakan terkait dengan Kawasan Sumur Banyuurip dapat ditinjau dari kebijakan pusat sampai daerah, diantaranya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No. 9 Tahun 2010 Tentang Kepariwisata. UU No. 9 Tahun 2010 menyebutkan bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi wisata.

Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

- b. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2030. Berdasarkan RTRW Kabupaten Bantul, Pola Ruang Desa Jatimulyo adalah Kawasan Hutan Lindung, dan Kawasan Lindung Sekitar Mata Air.
- c. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPDA) Daerah Istimewa Yogyakarta
Visi Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Bantul adalah “ Bantul Menjadi Destinasi Pariwisata Utama Indonesia Yang Bernuansa Harmoni Alam dan Budaya Untuk Kesejahteraan Masyarakat”.
Misi Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan destinasi pariwisata alam, budaya, dan minat khusus yang bernuansa lingkungan, berkelanjutan, dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat;
- 2) Mengembangkan pemasaran pariwisata yang terpadu, bertanggung jawab, dan berskala luas untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dengan mengikuti perkembangan teknologi;
- 3) Mengembangkan industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, mampu menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab atas kelestarian dan

keseimbangan lingkungan alam dan sosial budaya;

- 4) Mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dan sumber daya manusia yang efektif, efisien, dan mewujudkan masyarakat sadar wisata. Kecamatan Dlingo, termasuk dalam DPD (Destinasi Pariwisata Daerah) Pangeran Diponegoro meliputi Dlingo, Pandak dan Sedayu sebagai Kawasan Wisata Kerajinan, Sejarah, Budaya, Kuliner dan Pedesaan;

d. Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.

RDTR merupakan rencana yang menetapkan blok pada kawasan fungsional sebagai penjabaran kegiatan ke dalam wujud ruang yang memperhatikan keterkaitan antar kegiatan dalam kawasan fungsional agar tercipta lingkungan yang harmonis antara kegiatan utama dan kegiatan penunjang dalam kawasan fungsional tersebut. Sedangkan Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang. Zonasi adalah pembagian kawasan ke dalam beberapa zona sesuai dengan fungsi dan karakteristik semula atau diarahkan bagi pengembangan fungsi-fungsi lain.

Kabupaten Bantul pada tahun 2018, menyusun RDTR BWP Kawasan Perkotaan Kabupaten Bantul dan RDTR BWP Kawasan Pedesaan Kabupaten Bantul. Peta Zonasi RDTR BWP Kawasan Perkotaan Kabupaten Bantul digunakan untuk menggantikan Peta RDTR dan PZ BWP Kecamatan Banguntapan dan Bantul, sedangkan Peta Zonasi RDTR BWP Kawasan Pedesaan Kabupaten Bantul digunakan untuk menggantikan Peta RDTR dan PZ BWP Kecamatan Sedayu, Pajangan, Pandak, Bambanglipuro, Pundong, Jetis, Pleret, Imogiri, Dlingo dan Piyungan.

Secara administratif, Kecamatan Dlingo dibagi atas 6 (enam) desa, yaitu Desa Mangunan, Muntuk, Dlingo, Temuwuh, Jatimulyo, dan Terong. Luas wilayah masing-masing desa dan pembagian wilayah menjadi yang lebih kecil, yaitu Padukuhan dan RT. Kecamatan Dlingo merupakan wilayah yang didominasi oleh pegunungan dengan kontur yang cukup curam. Desa Jatimulyo, Kecamatan Dlingo dimana masuk dalam RDTR BWP Pedesaan, berdasarkan peta pola ruang sebagian zona perlindungan setempat sempadan sungai (PS1) dan sebagian besar merupakan zona peruntukan lainnya pertanian hortikultura (PL-

1B). Kawasan Banyuurip berada di PS-1 dan PL-1B. Pengembangan wisata yang direncanakan adalah wisata religi/petilasan (Sendang Bnyuurip) dan wisata alam, dengan memanfaatkan Sungai Oyo (PL-1B).

Metodelogi

Secara umum pendekatan yang digunakan adalah Kualitatif. Dengan metode ini, akan ditemukan data-data yang bersifat norma, nilai, tanggapan, kebiasaan, sikap mental, dan budaya yang dianut oleh seseorang maupun sekelompok maupun kelompok orang.

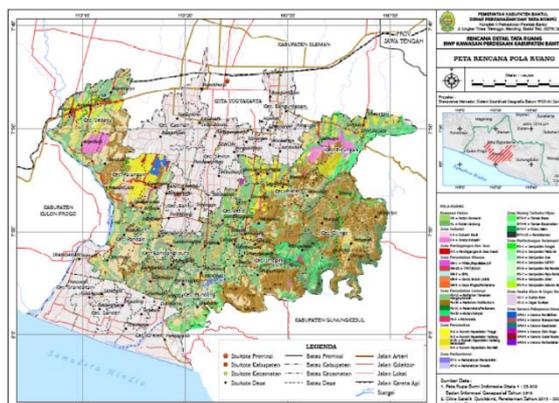
Dalam pengambilan data, dibedakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung diperoleh secara langsung oleh peneliti dari amatan, wawancara maupun kuisioner. Sedangkan data sekunder adalah data yang didapat peneliti dari artikel-artikel di internet, jurnal atau situs yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.

Dalam menganalisa juga digunakan metode analisis isi (*content analysis*) yaitu;

pada analisis kebijakan serta peraturan yang terkait, baik yang berlaku didaerah maupun nasional, serta didukung pengamatan secara eksploratif (empiris) kondisi fisik pada lokasi penelitian serta wawancara mendalam (*in depth interview*).

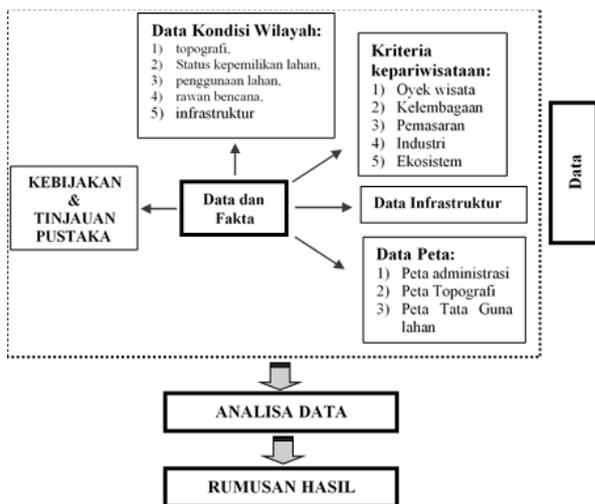


Gambar 1. Hirarki Perencanaan Tata Ruang Dalam RDTR – Masterplan Kawasan Wisata



Gambar 2. Peta Pola Ruang RDTR BWP Pedesaan, Kabupaten Bantul

Sumber: <https://dptr.bantulkab.go.id/hal/peta-rencana-pola-ruang-pdf>



Gambar 3. Penjabaran Tahapan Perencanaan Kawasan Wisata Banyuwirip

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Kawasan Sendang dan Sumur Banyuwirip masuk ke dalam wilayah administrasi Desa Jatimulyo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul. Desa Jatimulyo salah satu dari 6 desa yang ada di Kecamatan Dlingo yang terletak kurang lebih 15 km kearah timur laut dari Kecamatan Dlingo, Desa Jatimulyo mempunyai wilayah seluas : 891,03 ha, dengan batas – batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara:Desa Pengkok, Patuk, Gunungkidul
- b. Sebelah Timur:Desa Getas, Playen, Gunungkidul
- c. Sebelah Selatan:Desa Temuwuh, Dlingo, Bantul
- d. Sebelah Barat:Desa Terong, Dlingo, Bantul

Nama “Jatimulyo” dan nama-nama dusun tersebut mempunyai sejarah yang berhubungan erat dengan keberadaan Sunan Kalijaga. Jatimulyo adalah rangkaian dua kata yang diringkas yaitu : “sejatining kamulyan”, yang pada hakikatnya merupakan tujuan hidup semua manusia. Karena sesungguhnya setiap manusia pasti menginginkan kemuliaan yang sejati. Kemuliaan yang sejati adalah hidup tenteram dan bahagia baik di dunia sampai akhir nanti.

Desa Jatimulyo pada tahun 2018 jumlah penduduk mencapai 6.885 jiwa terdiri dari Laki-Laki 3.328 jiwa dan Perempuan 3557 jiwa dengan 2.163 KK. Mayoritas mata pencarian penduduk Desa Jatimulyo bergerak dibidang pertanian.

Konsep wisata yang akan dikembangkan di Kawasan Wisata Banyuwirip ini, harus memperhatikan prinsip konservasi dan preservasi. Hal ini dikarenakan ODTW yang akan dikembangkan adalah sumber air yang punya muatan sejarah. Dan konsep pengembangan

Kawasan Wisata Banyuwirip, di jabarkan dalam diagram berikut ini;



Gambar 4. Diagram Perencanaan Kawasan Wisata Banyuwirip

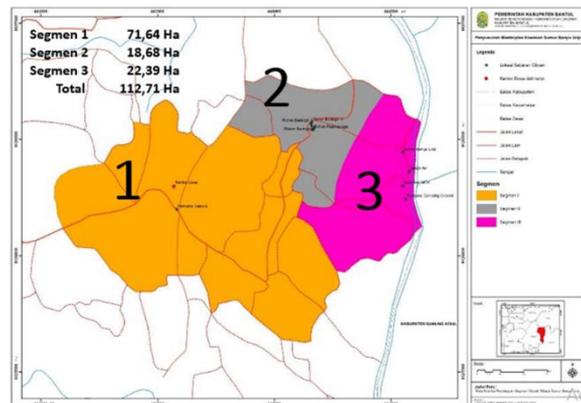
Konsep Makro

Kawasan perencanaan merupakan kawasan-kawasan yang berada di tepian sungai dan juga kawasan cagar budaya, oleh karena itu dalam perancangannya harus mengacu pada kaedah perancangan *Waterfront* dan kaidah pelestarian dengan penekanan konsep dasar desain diantaranya; Zonasi, Sirkulasi, Ruang Terbuka Hijau – Non Hijau atau Lanskap dan Sarana Prasarana. Pertimbangan-pertimbangan ini pada dasarnya mempunyai kepentingan untuk keberlangsungan pembangunan wisata di Kawasan Wisata Banyuwirip dan juga bermanfaat untuk wisatawan yang datang.

Manfaat untuk keberlangsungan penyelenggaraan wisata di Kawasan Wisata Banyuwirip adalah:

- 1) Pengembangan wisata religi/sejarah, wisata alam dan minat khusus di Kawasan Wisata Banyuwirip, menetapkan zonasi, yaitu; Segmen I, Segmen II dan Segmen III (Gambar 5)
- 2) Mengikutsertakan masyarakat dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan wisata dan memberikan keuntungan ekonomi terutama kepada masyarakat lokal.

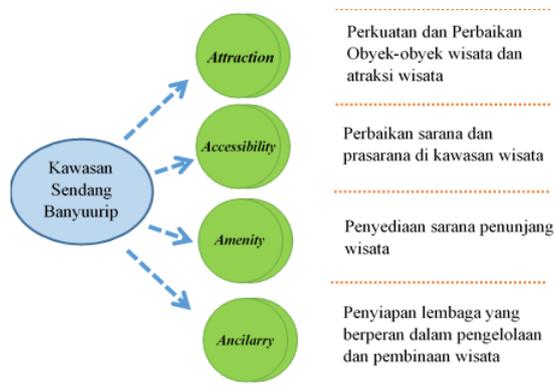
Memberikan peningkatan pengetahuan tentang karakteristik kawasan Banyuwirip, budaya Jawa kerakyatan dan lingkungan sungai bagi wisatawan sebagai destinasi wisata yang mempunyai kekhasan.



Gambar 5. Peta Pembagian Zona Perencanaan Kawasan Wisata Banyuwirip

Konsep Mezzo

Konsep Mezzo yang direncanakan dikembangkan di Kawasan Wisata Banyuurip mengacu pada komponen pariwisata 4A, yaitu; *attraction, accessibility, amenity dan ancillary*. Penggambaran komponen pariwisata 4A dan pelaksanaannya dilapangan, dapat dilihat pada diagram berikut ini;



Gambar 6. Konsep Mezo Perencanaan Kawasan Wisata Banyuurip

Konsep Mezo meliputi :

a. Pengembangan Atraksi (*Attraction*)

Paket wisata dapat dikembangkan untuk menambah nilai kekhasan wisata di kawasan ini. Kawasan Wisata Banyuurip menawarkan ODTW situs Sendang Banyuurip, Sumur Banyuurip.

Berdasarkan potensi yang ada dan untuk memperkaya variasi atraksi di Kawasan Wisata Banyuurip, atraksi yang dapat dikembangkan antara lain;

- 1) Atraksi pendidikan sejarah, merupakan kegiatan pengembangan pengetahuan khususnya sejarah asal usul warisan budaya Sendang Banyuurip, Sumur Banyuurip, Kedung Pocot, Jatih Kluwih dan lainnya.
- 2) Atraksi jelajah alam, merupakan kegiatan jelajah alam yang dikembangkan untuk menikmati keindahan alam di tepian Sungai Oyo.
- 3) Atraksi rekreasi, merupakan kegiatan beristirahat dan bersantai, difasilitasi dengan pengembangan lansekap yang menarik dengan berbagai vegetasi yang menyegarkan untuk melepas penat wisatawan.
- 4) Wisata memancing di Sungai Oyo.
- 5) Atraksi river tubing Sungai Oyo.
- 6) Atraksi agrowisata budidaya kentang hitam

b. Pengembangan Aksesibilitas (*Accessibility*)

Kawasan Desa Jatimulyo merupakan kawasan yang relatif mudah untuk ditempuh. Di sisi lain, terdapat beberapa destinasi wisata lain yang terkoneksi dengan kawasan ini. Akses dari dan menuju Kawasan Desa Jatimulyo serta kawasan

wisata lain di sekitarnya perlu dikelola dengan baik untuk menghindari *bottleneck* lalu lintas.

Kawasan Wisata Banyuurip dapat diakses dari arah jalan kabupaten Patuk – Dlinggo - Imogiri. Untuk memperkuat sebagai Kawasan Wisata Banyuurip, maka perlu dibangun sebuah *landmark* kawasan. *Landmark* kawasan yang direncanakan adalah gerbang kawasan.

Memperjelas akses didalam kawasan, perlu dilengkapi penanda, yang dapat berfungsi membantu pengunjung mencari lokasi objek wisata (*way finding*). Selain itu, untuk mengantisipasi semakin berkembangnya kawasan perencanaan., maka akan dikembangkan area parkir dan intermoda.

Pengadaan sarana transportasi intermoda yang melewati destinasi wisata diperlukan untuk melayani pengunjung dari lokasi parkir terpusat ke ODTW Sendang Banyuurip, Sumur Banyuurip, area *river tubing, camping ground* dan area agrowisata

Lokasi obyek yang relatif saling berdekatan membuat kawasan wisata bersinergi membentuk suatu kawasan besar destinasi wisata yang saling terhubung. Hal tersebut juga berpotensi memecah konsentrasi kerumunan (*crowd*) yang melebihi daya tampung (*carrying capacity*) di satu destinasi populer tertentu pada peak season.

Rencana alat transportasi lokal antar kawasan akan membantu pengunjung tidak menggunakan kendaraan sendiri.

c. Pengembangan Amenitas (*Amenity*)

Amenities atau sarana prasarana penunjang kegiatan pariwisata, perlu dikembangkan untuk mendukung kegiatan wisata. Pengembangan *amenities* disesuaikan dengan kebutuhan pengunjung.

Tabel 1. Konsep Pengembangan Amenities

No.	Jenis <i>Amenity</i>	Rencana Pengembangan
1.	Penginapan	a. <i>Homestay</i> disekitar Kawasan Sendang Banyuurip b. <i>Homestay</i> direncanakan rumah penduduk yang di modifikasi dengan standar fasilitas <i>homestay</i> c. <i>Homestay</i> bernuansa arsitektur lokal / Jawa d. <i>Homestay</i> dikelola oleh warga dan dibina oleh Dinas Pariwisata
2.	Restoran / Pusat Kuliner	a. Merencanakan lokasi kuliner yang berada di Kawasan Sendang Banyuurip b. Menggali kuliner lokal yang berbeda dengan di daerah lain c. Bangunan bernuansa arsitektur lokal / Jawa
3.	Cinderamata	a. Menciptakan hasil kerajinan dari bahan kayu dengan ukuran lebih kecil

No.	Jenis <i>Amenity</i>	Rencana Pengembangan
		(bisa dibawa), seperti; patung, perhiasan b. Pembinaan UMKM c. Kerjasama dengan desa terdekat, yang mempunyai produk kerajinan
4.	Fasilitas umum seperti sarana ibadah, kesehatan, taman, toilet, ruang sekretariat, tempat souvenir, tempat ibadah	a. Fasilitas di lokasi wisata b. Bangunan bernuansa arsitektur lokal / Jawa
5.	Agen Perjalanan	Bekerjasama dengan agen perjalanan / <i>tour and travel</i>
	Pemandu wisata	a. Peningkatan pemandu wisata secara kuantitas dan kualitas b. Memberikan bekal pengetahuan tentang sejarah asal-usul Sendang Banyuurip dan sejarah Desa Jatimulyo
7.	Pelayanan Perbank-kan	Pengembangan fasilitas perbank-kan, terutama bank dengan jaringan nasional
8.	SPBU	Pengembangan fasilitas SPBU

Konsep Mikro

Konsep Mikro Masterplan Obyek Wisata Kawasan Wisata Banyuurip adalah kesepakatan dan pertimbangan untuk penatan Sarana Prasarana Wisata.

a. Konsep Bangunan Berdasarkan Segmen

Pembagian segmen Kawasan Sumur Banyuurip dalam masterplan ini untuk kepentingan teknis perencanaan, yaitu untuk mengelompokkan berdasarkan karakteristik wilayah, jenis dan sebaran obyek wisata.

Pembangunan bangunan baru yang berada di Kawasan Wisata Banyuurip, pembangunan elemen lansekap serta sarana prasarana pariwisata, harus menggunakan referensi arsitektur yang menjadi kekhasan kawasan tersebut, yakni mengacu kepada bentuk bangunan arsitektur Jawa Kerakyatan dan penggunaan bahan bangunan setempat secara optimal. Dalam Kawasan Wisata Banyuurip direncanakan akan ada ketentuan-ketentuan yang diterapkan pada bangunan baru agar ada kesinambungan estetika yang berasal dari kesinambungan budaya masa lalu dan sesuai dengan lansekap daerah tersebut.

Arsitektur Bangunan bernuansa Jawa harus selaras dengan kehidupan masyarakat di sekitarnya dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Menyelaraskan elemen bangunan dan rupa bangunan, dengan Budaya Jawa; dan
- 2) Mentaati ketentuan pelestarian zonasi di Kawasan Wisata Banyuurip.

Arsitektur Bangunan bernuansa budaya daerah diwujudkan dengan menerapkan bentuk/sosok bangunan, bahan/material, pewarnaan, ornamen dan/atau ragam hias, tata letak dan tata ruang

bangunan, penempatan ruang terbuka, vegetasi, dan perabot ruang luar. Arsitektur bangunan bernuansa budaya daerah diberlakukan pada bangunan dengan fungsi permukiman, pendidikan, keagamaan, perdagangan dan jasa, sosial dan budaya, pariwisata serta fungsi khusus. Arsitektur bangunan bernuansa budaya daerah diberlakukan pada bangunan milik perseorangan, kelompok orang, masyarakat, Pemerintah/pemerintah daerah, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum. Penerapan ketentuan ini tergantung di Segmen mana bangunan tersebut dibangun, Segmen I, Segmen II dan Semen III.

b. Konsep Lansekap atau Tata Hijau

Berdasarkan jenis tanah di Kawasan Sumur Banyuurip, berupa tanah Mediteran Merah dan Renzina, maka perlu pertimbangan pemilihan tanaman yang cocok dan dapat hidup di tanah tersebut. Jenis tanaman penutup tanah dan perdu dipertimbangkan untuk berwarna sedangkan jenis pohon merupakan tanaman endemik. Jenis-jenis pohon dibagi lagi kedalam jenis pohon yang berganti daun (*deciduous*) dan setiap saat selalu berdaun (*evergreen*).

Vegetasi yang disarankan ditanam di lokasi ini adalah jenis pohon yang bersifat suksesif, artinya jenis pohon yang mudah tumbuh di Kawasan Sumur Banyuurip. Apabila hal tersebut dapat dilakukan, maka diperkirakan akan berfungsi antara lain sebagai:

- 1) pohon perindang;
- 2) penahan limpasan air hujan (*run off*);
- 3) komponen pengendali iklim; dan
- 4) bagian dari lansekap dengan fungsi estetika.
- 5) Tanaman yang mempunyai filosofi baik (Sawo Kecik, Asam, Tanjung, dan lain-lain.)
- 6) Tanaman endemik (Jati, Kluwih, Mahoni, Kayu Putih, Akasia dan lain-lain.)
- 7) Tanaman pengundang burung (tanaman dengan ketinggian minimal 10m)
- 8) Tanaman yang terkait dengan kebudayaan Jawa
- 9) Tanaman cadangan bahan bangunan

Direkomendasikan agar penanaman pohon perindang di Kawasan Wisata Banyuurip lebih ditingkatkan untuk mendapatkan kondisi lingkungan yang lebih optimal, terutama dalam rangka melindungi permukaan tanah. Beberapa jenis tanaman yang direkomendasikan adalah jenis tanaman yang tidak banyak membutuhkan air. Beberapa di antaranya tersebut pada Tabel berikut ini:

Tabel 2. Jenis Vegetasi di Kawasan

No	Nama lokal	Nama Ilmiah	Asal Tanaman
1	Akasia daun besar	<i>Acacia mangium</i>	Australia
2	Akasia kuning	<i>Acacia auriculaeformis</i>	Australia

No	Nama lokal	Nama Ilmiah	Asal Tanaman
3	Angsana	<i>Pterocarpus indicus</i>	Malaysia
4	Asam	<i>Tamarindus indica</i>	India
5	Jati	<i>Tectona Grandis</i>	India
6	Beringin	<i>Ficus benjamina</i>	Malaysia
7	Bougenvil	<i>Bougenvillea glabra</i>	Brasil
8	Bunga sapatangan	<i>Maniltoa grandiflora</i>	Papua (Indonesia)
9	Bungur	<i>Lagerstomea indica</i>	Malaysia
10	Cempaka	<i>Michelia champaka</i>	India
11	Flamboyan	<i>Delonix regia</i>	Madagaskar
12	Kaliandra	<i>Calliandra haematocephala</i>	Amerika utara
13	Ketapang	<i>Terminalia cattapa</i>	India
14	Kupu-kupu	<i>Bauhinia purpurea</i>	Asia Tenggara
15	Mahony daun lebar	<i>Swietenia macropilla</i>	India



Gambar 8. Desain Desain Kawasan Wisata Banyuurip

Tanaman perdu dengan ketinggian di bawah 3 m dipertimbangkan untuk memberikan suasana meriah dan menarik, sehingga dipilih tanaman yang dapat berbunga di tanah Grumozol sepanjang waktu. Tanaman yang dianjurkan adalah:

- 1) Tanaman yang mempunyai peran sebagai obat herbal (empon-empon), bumbu dapur, dan umbi-umbian. Tanaman tersebut diantaranya adalah: Uwi, Umbili, Gadung, Kunyit, Kencur, Jahe dan sebagainya.
- 2) Tanaman berwarna – warni (*colourfull*), seperti: Lily Paris, Sirih, Melati, Sokka, Anggrek tanah, Krokot, Kamboja Jawa, Jengger Ayam, dan lain-lain.

Selain vegetasi, lanskap yang akan direncanakan adalah penguatan lanskap darat berupa pintu landmark (*tetenger*) kawasan, berupa gapura sekaligus berfungsi sebagai gerbang masuk kawasan. Lokasi landmark direncanakan di sebelah barat lapangan desa yang akan digunakan sebagai tempat parkir terpusat.

Lanskap air juga direncanakan ditata sekaligus sebagai upaya penegasan batas sempadan Sungai Oyo. Penataan lanskap air berupa : jalan akses, taman, penanda, vegetasi di sempadan, dan pembuatan pedestrian untuk susur tepian sungai dan fishing ground.



Gambar 7. Desain Gerbang Kawasan Wisata Banyuurip

Kesimpulan

Perancangan Kawasan Wisata Banyuurip dikembangkan wisata religi dan alam. Dan dalam penataan ruang, harus memperhatikan konservasi dan sustainable kawasan. Hal ini didasari pada Kawasan Banyuurip merupakan zona perlindungan setempat sempadan sungai (PS1). Dan juga ODTW Sendnag Banyuurip merupakan mata air yang harus dilestarikan.

Penataan Kawasan Wisata Banyuurip, dikembangkan dengan pembagian kawasan menjadi 3 zonasi, yaitu; Segmen I, Segmen II dan Segmen III. Dimana setiap zonasi mempunyai aturan pengembangan yang berbeda-beda.

Mendukung Kawasan Wisata Banyuurip, menjadi salah satu tujuan wisata potensial, maka perlu diperhatikan 4A dalam pengembangannya. Konsep 4A, yaitu; *attraction, accessibility, amenity* dan *ancilliary*.

Daftar Pustaka

- 1) _____.2018. Peta Pola Ruang RDTR BWP Pedesaan. Kabupaten Bantul. <https://dptr.bantulkab.go.id/hal/peta-rencana-pola-ruang-pdf>, 2018
- 2) _____.2018. *Legenda-Sendang-Banyu-Panguripan* <https://sclm17.blogspot.com/2018/01/legenda-sendang-banyu-panguripan.html> Sejarah, Cerita, Legenda, Mitos, TOKOH, Situs. 2018.
- 3) _____.2011. Raperda No. 4/Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010 -2030. Bantul.
- 4) _____.2019. Laporan Akhir Penyusunan Masterplan Masterplan Kawasan Sumur Banyuurip. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemerintah Kabupaten Bantul. 2019.

- 5) Carr, Stephen, et.all. 1992. *Public Space*. Australia: Press Syndicate of University of Cambridge.
- 6) Cooper et. al. 1993. *Tourism Principles & Practice.England* : Longman Group Limited.
- 7) Pendit, N S. 1994. *Ilmu Pariwisata: Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- 8) Suwarno, Nindyo. 2009. *Model Pengembangan Tata Ruang Kawasan Objek Wisata Air Studi Kasus: Objek Wisata Air Jolotundo. Klaten*. UGM.

PERENCANAAN GAPURA DI KAWASAN MCK TERPADU JL. TIRTARONA RT 03, RW 07, KELURAHAN TLOGOMAS, KECAMATAN LOWOKWARU, KOTA MALANG

Agustina Nurul Hidayati¹, Mohammad Reza², Fardiah Qonita³,
M. Dafa Murtado⁴, Andhyka Putra B⁵, Utas Satrio Pangintan⁶,
Evan⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota

^{1,2,3,4,5,6,7}Institut Teknologi Nasional Malang

³) 1724029.fardiahq@gmail.com

Abstract

The gate as an identity in an area can be a center for depicting partnerships between the Tirtarona Foundation as a tour manager caring for changes in the Integrated Sanitation area with the National Institute of Technology Malang as a university in the field of technology that can enable to introduce the seriousness of the National Institute of Technology in developing technology in seeking the vision of the National Institute of Technology Malang to the community. For this reason, in the community service program we hope to provide a choice of the concept of the gate that will be built in the Integrated Sanitation Area.

Keywords: Gate, Identity, Integrated Sanitation Area

Pendahuluan

Latar Belakang

Institut Teknologi Nasional Malang memiliki visi yaitu sebagai lembaga Pendidikan yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi terapan dan seni, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berbudi luhur, berjiwa kewirausahaan, professional dan berwawasan global. Untuk dapat menyebarkan serta menindaklanjuti visi Institut Teknologi Nasional Malang secara lebih luas tentunya, diperlukan upaya nyata diantaranya dengan membangun hubungan kemitraan dengan Yayasan Tirtarona sebagai pengelola wisata peduli perubahan iklim serta kawasan MCK Terpadu yang berlokasi di Jl. Tirtarona RT 03, RW 07, Kelurahan Tlogomas.

Gapura sebagai identitas pada suatu wilayah dapat menjadi sarana dalam menunjukkan adanya kemitraan antara Yayasan Tirtarona sebagai pengelola wisata peduli perubahan iklim serta kawasan MCK Terpadu dengan Institut Teknologi Nasional Malang sebagai perguruan tinggi dibidang teknologi sehingga diharapkan dapat mengenalkan keseriusan Institut Teknologi Nasional Malang dalam pengembangan teknologi sebagaimana visi Institut Teknologi Nasional Malang pada masyarakat secara umum.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberi bantuan perancangan Teknik kepada masyarakat Jl. Tirtarona RT 03, RW 07, Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang

Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat Hasil dari kegiatan penelitian ini berupa rancangan bangunan tugu yang akan digunakan sebagai acuan atau pedoman dalam pelaksanaan pembangunan nantinya.

Tinjauan Pustaka

Perancangan

Perancangan adalah suatu kreasi untuk mendapatkan suatu hasil akhir dengan mengambil suatu tindakan yang jelas, atau suatu kreasi atas sesuatu yang mempunyai kenyataan fisik. Dalam bidang teknik, hal ini masih menyangkut suatu proses dimana prinsip-prinsip ilmiah dan alat-alat teknik seperti matamatiikan komputer dan bahasa dipakai, dalam menghasilkan suatu rancangan yang kalau dilaksanakan akan memenuhi kebutuhan manusia. (Ratodi, 2015)

Citra Lokasi

Citra Lokasi terdiri dari tiga rangkaian komponen yang berbeda yang dibutuhkan diantaranya yaitu: cognitive image, affective image dan unique image. Cognitive Image, terdiri dari kualitas pengalaman yang didapat oleh para wisatawan, atraksi wisata yang ada di suatu destinasi, lingkungan tersebut, dan tradisi budaya dari destinasi tersebut. Affective Image, terdiri dari atraksi yang menyenangkan, membangkitkan, santai, dan menarik ketika di suatu destinasi. Unique image, terdiri dari lingkungan alam, kemenarikan suatu destinasi dan atraksi lokal yang ada di destinasi tersebut. (Fatimah, 2019)

Gapura

Pada hakekatnya gapura/gerbang merupakan pintu. Pintu-pintu tersebut tidak sekedar bidang kosong untuk keluar-masuk tetapi diberi pelengkap. Bingkai pintunya dibuat dengan ukuran besar sehingga pintu ini merupakan bangunan tersendiri. Sehingga bentuk disekitar pintu ini nampak lebih menonjol daripada pagar keliling. Keseluruhan bangunan yang melingkupi pintu inilah yang dimaksud gapura. (Purnama, 2013)

Metode Penelitian

Lingkup Studi dan Wilayah Penelitian

Lingkup wilayah penelitian ini adalah masyarakat Jl. Tirtarona RT 03, RW 07, Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.

Metode Penelitian dan Analisis Data

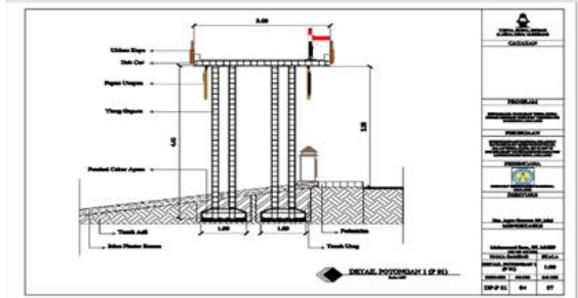
Metode analisa yang sesuai di sini adalah menganalisa bentuk dasar gapura terhadap arah view di sekitarnya. Tahapan selanjutnya adalah meletakkan tanaman yang sesuai untuk memperkuat keberadaan dan bentuk gapura yang ada. Tahapan terakhir adalah mengoptimalkan hasil desain yang diperoleh dengan olahan taman kecil di sekitar gapura. Pola pembentukan gapura yang ada menunjukkan bahwa ada beberapa faktor tambahan yang perlu diperhatikan yakni jarak gapura terhadap obyek lainnya di sekitarnya. Semakin besar jarak gapura terhadap obyek di sekitarnya, maka akan semakin mudah menjadikan gapura sebagai identitas yang kuat. Pemikiran pentingnya mempertimbangkan faktor manusia saat seseorang melintasi suatu obyek seperti saat dengan kebutuhan tertentu adalah sebagaimana juga diutarakan oleh Allen dan kawan-kawan (2014) serta Zhu dan Shi (Wardhana, Idrasprasti, & Fitriana, 2017). kemudian dikompilasikan dengan teori maupun data lainnya. Pengidentifikasi faktor-faktor yang berperan dalam pengembangan potensi kepariwisataan dilakukan dengan cara menentukan faktor-faktor berdasarkan pada faktor pengaruh dari teori dan faktor pengaruh lokal. Penentuan strategi pengembangan menggunakan metode IPA (*Importance Performance Analysis*) yang menghasilkan tipe kuadran strategi pengembangan.

Hasil dan Pembahasan

Dari hasil pelaksanaan penelitian di lapangan, diperoleh data bahwa masyarakat Jl. Tirtarona RT 03, RW 07, Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang sudah memiliki gapura sebelumnya, namun seiring dengan pesatnya laju pembangunan sehingga keberadaan gapura lama tertutup oleh pertokoan.

Ditambah dengan adanya bentuk kerjasama antara Institut Teknologi Nasional, Malang dengan Yayasan Tirtarona sebagai pengelola MCK Terpadu yang terletak di masyarakat Jl. Tirtarona RT 03, RW 07, Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru,

Kota Malang sehingga diperlukan adanya gapura yang representatif sebagai penanda keberadaan pengelola MCK Terpadu yang terletak di masyarakat Jl. Tirtarona RT 03, RW 07, Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.



Gambar 1. Rancang Bangun Gapura Yayasan Tirtarona

Melalui proses penelitian ini diperoleh beberapa poin dalam membuat rancangan desain, antara lain yaitu:

1. Lokasi gapura dimajukan sejajar dengan pertokoan
2. Gapura didesain dengan filosofi yang merepresentasikan nilai – nilai filosofi kawasan MCK Terpadu yang terdapat di Jl. Tirtarona RT 03, rw 07 Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang
3. Konsep yang diajukan diupayakan mampu menjadi media mengenalkan adanya bentuk Kerjasama antara Institut Teknologi Nasional Malang dengan Yayasan Tirtarona dalam pengembangan teknologi pengolahan limbah rumah tangga.

Adapun filosofi yang terkandung dalam desain gapura yaitu sebagai berikut

1. Warna putih yang melatarbelakangi tulisan “Selamat Datang di Kawasan MCK Terpadu” melambangkan kemurnian
2. Tulisan “Selamat Datang di Kawasan MCK Terpadu” berwarna hijau melambangkan pertumbuhan dimana kawasan MCK Terpadu mendukung kelestarian lingkungan secara berkelanjutan
3. Warna Abu – abu pada salah satu sisi gapura sebagai simbol kestabilan
4. 4 garis layer berwarna abu - abu pada salah satu sisi gapura melambangkan keseimbangan unsur alam
5. 3 garis layer berwarna orange pada salah satu sisi gapura melambangkan filosofi nista, madya dan utama tahapan pada perkembangan yang dianut oleh masyarakat jawa yang dibalut dengan kreativitas yang dilambangkan dengan warna orange

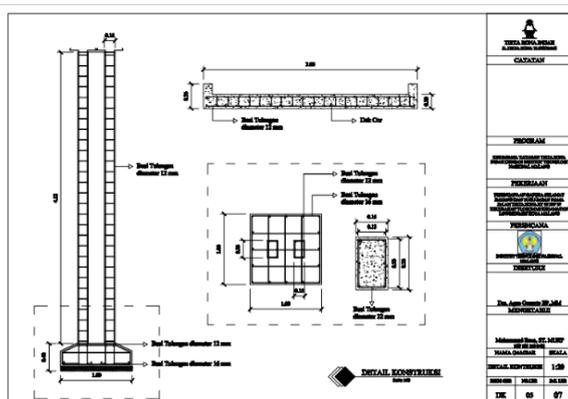
Detail pada material konstruksi menggunakan material beton dengan besi tulangan diameter 16 mm dan 12 mm dan pondasi berukuran 1 m x 1m x 0,4 m dan tinggi gapura 4,12 m. Detail pada material atap gapura menggunakan besi tulangan diameter

12mm dengan ketebalan 0,20 m dan panjang 3 meter.

Green Design sebagai Upaya Pembentuk Identitas suatu Lingkungan . *Jurnal Desain Interior* , 21-26.



Gambar 2. Detail Konstruksi Rancang Bangun Gapura



Gambar 2. Detail Konstruksi Tiang dan Atap Gapura

Kesimpulan

Kawasan MCK Terpadu yang terletak di Jl. Tirtarona RT 03, RW 07, Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang memiliki potensi citra lokasi yang perlu diperkuat dengan adanya gapura sebagai penanda kawasan. Disamping menjadi batas penanda kawasan, keberadaan gapura juga merupakan representasi daya Tarik yang ada di kawasan MCK Terpadu

Daftar Pustaka

- 1) Fatimah , S. (2019). Analisis Pengaruh Citra Destinasi dan Lokasi Terhadap Minat Berkunjung Kembali . *Majalah Ilmiah Bahari Jogja* , 27-40.
- 2) Purnama , I. (2013). Peneraoan Material Bata Pada Gapura/ Gerbang Masuk Bangunan. *Seminar Nasional Scan* (pp. 129-135). Cirebon : Prodi Arsitektur Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon .
- 3) Ratodi , M. (2015). *Metode Perancangan Arsitektur* . Surabaya: Universitar Islam Negri Sunan Ampel .
- 4) Triastianti , R. D., Nasirudin , Sukirno , & Warsiyah. (2017). Konservasi Sumber Daya Air dan Lingkungan Melalui Kearifan Lokal di Desa Margodadi Kecamatan Seyegen Kabupaten Sleman Yogyakarta . *Kawistara*, 207-314
- 5) Wardhana, M., Idrasprasti, A., & Fitriana, R. N. (2017). Kajian Desain Gapura dengan Konsep

PENENTUAN ZONASI DAERAH RAWAN BENCANA LONGSOR STUDI KASUS DI KECAMATAN TUMPANG, KABUPATEN MALANG

Mohammad Reza¹, Ghestiar Kharisma Kusumo², Mita Nur Bulan Sari³,
Alisyah Fahza Nur Rahmah⁴, Tasya Almira Syah Putri⁵, Yohanes Kurnia Natalino⁶,
Muhammad Ilham⁷

¹²³⁴⁵⁶⁷)Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
¹²³⁴⁵⁶⁷)Institut Teknologi Nasional Malang
²)rz.abang@gmail.com

Abstract

Tumpang Subdistrict is one of the sub-districts in Malang Regency which has many steep slopes especially in the east of Tumpang Subdistrict, this area has a high potential for natural disasters, one of which disasters is landslides, so it needs to be repaired. Landslides by tracing the areas that caused landslides in order to minimize losses caused. The purpose of this study is to know the cause and distribution areas which has high potential of landslides. This research method is scoring and weighting, and overlapping with physical digital basic map Tumpang to get areas that use landslides, which are processed using ArcGis 10.2 software. The results of this study are Landslide Prone Maps which are maps that describe areas with the level of landslide vulnerability assessment in the study area. With this result, then it becomes a reference in landslide disaster mitigation to assist the government in diverting landslide disasters in the area

Keywords: Map of Prone Landslides, Landslides, Mitigation of Tumpang Subdistrict

Pendahuluan

Latar Belakang

Bencana alam adalah suatu kejadian alam yang dapat terjadi setiap waktu. Salah satu kejadian alam yaitu bencana tanah longsor. Tanah longsor yaitu Bergeraknya massa tanah atau batuan akibat terjadinya gangguan kestabilan lereng. Faktor yang memicu tanah longsor yang terdapat dua, berupa faktor alami seperti morfologi, struktur geologi, landuse, jenis tanah, struktur geologi, klimatologi (curah hujan) dan kegempaan (Utomo & Widiatmaka, 2013). Meningkatnya risiko bencana longsor juga terjadi disebabkan karena alih fungsi lahan yang tidak terkontrol karena peningkatan populasi penduduk sehingga diperlukan pengembangan lahan untuk kegiatan permukiman, ekonomi maupun infrastruktur (Priyono & Priyana, 2006).

Tanah longsor adalah salah satu bencana terbesar ke 3 (tiga) setelah bencana banjir dan puting beliung yang sering terjadi di Indonesia yang mana merupakan negara yang terdapat pertemuan tiga lempeng tektonik aktif yang geografis rawan terjadi bencana alam. Tanah longsor sangat sulit untuk diprediksi dan bisa terjadi kapan saja namun tanah longsor ditimbulkan bukan hanya karena gejala geologi tapi ada ulah campur tangan manusia juga menjadi salah satu pemicu adanya longsor tanah. Beberapa faktor geologi yang dapat menimbulkan longsor tanah diantaranya: hujan, tanah yang kurang padat atau kuat, lereng

yang terjal, getaran dan tersebarnya zona jenuh air di bawah permukaan.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan tanah longsor adalah: hujan, tanah terjal, tanah yang kurang padat, batuan yang kurang kuat, getaran, surut muka air danau atau bendungan, adanya beban tambahan, pengikisan/erosi, adanya material timbunan pada tebing, bekas longsor lama, adanya bidang diskontinuitas (bidang tidak sinambung), penggundulan hutan, daerah pembuangan sampah (ESDM 2007).

Bencana tanah longsor pernah terjadi di Desa Duwet Krajan, Tumpang pada Senin 11 Februari 2019 Longsor terjadi akibat curah hujan yang tinggi, Berdasarkan data tim Tagana Kabupaten Malang, sedikitnya 3 rumah warga mengalami kerusakan. Kerusakannya seperti, rusaknya dapur belakang rumah dan rusaknya pekarangan belakang rumah milik salah satu warga. Namun longsor yang terjadi di Kecamatan Tumpang terjadi dalam skala kecil.

Alasan dari pemilihan lokasi penelitian adalah karena Kecamatan Tumpang terletak di area Kawasan Strategis Nasional Bromo Tengger Semeru (KSN) dimana nantinya akan terjadi perkembangan setiap tahunnya. Selain itu juga Kecamatan Tumpang yang merupakan salah satu daerah yang rawan bencana longsor yang dapat dilihat dari segi morfologi, struktur geologinya dan daerah yang berada di ketinggian 597 meter di atas permukaan laut yang rentan terjadi longsor. Adapun untuk tingkat kerentanan bencana longsor di Kecamatan Tumpang belum diketahui dengan pasti. Ada kemungkinan daerah ini memiliki

tingkat kerentanan longsor yang tinggi. Maka dari itu peneliti mengambil lokasi kecamatan tumpang untuk mengetahui tingkat kerentanan serta adanya pemetaan sebaran daerah-daerah yang rawan terjadi bencana longsor agar nantinya dapat digunakan sebagai acuan dalam suatu perencanaan untuk kedepannya dan kecamatan tumpang rencananya akan menjadi kawasan perkotaan.

Potensi terjadinya tanah longsor yang tinggi di Kecamatan Tumpang diperlukan adanya pemetaan terhadap tanah longsor. Oleh sebab itu untuk meminimalisir terjadinya bencana yang akan menimbulkan kerugian baik berupa materi, harta benda dan keselamatan penduduk sekitar, diperlukan adanya pemetaan bahaya tanah longsor di daerah tersebut untuk mengetahui persebaran potensi tanah longsor. Adapun pemetaan potensi tanah longsor diolah menggunakan software pemetaan, salah satunya adalah software ArcGis, dengan menggunakan parameter-parameter yang digunakan dalam pemetaan bencana longsor.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a) Bagaimana tingkat kerentanan bencana longsor di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang?
- b) Dimana sebaran daerah yang rentan terjadi bencana longsor di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis daerah rawan bencana longsor di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.

Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini daerah penelitian mencakup 1 kecamatan di Kabupaten Malang yaitu Kecamatan Tumpang, Kecamatan ini terdiri dari 15 Desa, 41 Dusun, 109 RW, dan 659 RT. Ke-15 desa di kecamatan ini adalah Desa Tumpang, Malanguko, Jeru, Wringinsongo, Bokor, Slamet, Kidal, Kambinan, Ngingit, Pandanajeng, Pulungdowo, Tulusbesar, Benjor, Duwet dan Duwetkrajan. Kecamatan Tumpang dikelilingi oleh kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Malang. Di sebelah utara, Kelurahan Tumpang berbatasan langsung dengan Kecamatan Jabung. Sedangkan di sebelah timur, kecamatan ini berbatasan langsung dengan Pegunungan Bromo Semeru. Di sebelah selatan, Kecamatan Tumpang berbatasan dengan Kecamatan

Poncokusumo. Lalu, di sebelah barat, kecamatan ini berbatasan dengan Kota Malang.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode yang dilakukan dalam penelitian dapat dilakukan dengan survei primer dan survei sekunder.

a. Survei Primer

Survei Primer adalah metode yang dilakukan secara langsung di lapangan sehingga memperoleh gambaran eksisting pada wilayah tersebut, berupa informasi dan data primer yang berkaitan dengan kondisi fisik eksisting. Metode ini dilakukan melalui wawancara, observasi dan kuisisioner.

i. Wawancara

Menurut Prabowo (1996) wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang responden, caranya adalah dengan bercakap cakap secara tatap muka. Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Dalam hal ini informasi yang dibutuhkan dengan menanyakan langsung kepada narasumber yang ada di lokasi penelitian.

ii. Observasi

Menurut Nawawi & Martini (1991) observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian. Metode ini digunakan dengan turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi eksisting (sebenarnya) di lokasi penelitian yaitu survei fisik yang mencakup semua penelitian-penelitian yang akan dituangkan di dalam peta.

iii. Kuisisioner

Kuisisioner merupakan suatu teknik pengumpulan data secara tidak langsung (peneliti tidak langsung bertanya jawab dengan responden). Instrumen atau alat pengumpulan datanya juga disebut angket berisi sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau direspon oleh responden. Responden mempunyai kebiasaan untuk memberikan jawaban atau respon sesuai dengan presepsinya. Dilakukan dengan menyebarkan angket pertanyaan mengenai aspek-aspek yang diteliti sesuai dengan topik permasalahan apa yang diambil dalam penelitian.

b. Survei Sekunder

Dalam survei sekunder, yang dilakukan adalah mencari dan mengumpulkan data – data sekunder yang tersedia pada dinas atau instansi terkait. Data sekunder sendiri berisikan tentang buku, tabulasi data, artikel, laporan dan sumber-sumber lain yang dapat mendukung kegiatan penelitian

3. Data yang Digunakan

Data spasial dalam SIG dipresentasikan dalam dua format, yaitu format spasial dan format raster. Data spasial itu sendiri merupakan data yang bersifat keruangan. Data yang telah dikumpulkan sebelumnya dalam format spasial berupa peta analog, yaitu peta parameter. Berikut data spasial yang digunakan dalam penelitian ini.

- a) Citra DEM Kecamatan Tumpang
- b) Citra Landsat 8 Kecamatan Tumpang
- c) Data curah hujan harian Kecamatan Tumpang
- d) Peta Geologi Digital Kecamatan Tumpang
- Peta Jenis Tanah Digital Kecamatan Tumpang

4. Pengolahan Data

Pengolahan data pada penelitian ini terdiri dari beberapa proses untuk mendapatkan parameter-parameter penyebab tanah longsor. Peta jenis tanah, geologi dan tutupan lahan berupa shapefile dilakukan clip pada daerah penelitian. Pengolahan curah hujan dilakukan dengan membuat Poligon Thiessen dari 9 stasiun penakar curah hujan di daerah penelitian. Metode Thiessen merupakan metode yang ditentukan dengan cara membuat poligon antar stasiun pada suatu wilayah. Setelah area ditentukan kemudian menghitung curah hujan tahunan dari data tabular curah hujan harian.

Pengolahan Landsat 8 dilakukan klasifikasi supervised yang dikelaskan menjadi 6 kelas tutupan lahan yaitu hutan, sawah, semak, pemukiman, kebun dan tanah kosong. Kemudian hasil klasifikasi dilakukan uji ketelitian dengan keadaan dilapangan. Pengolahan DEM dilakukan untuk mendapatkan kemiringan lereng, DEM diekstrak menjadi kontur dan kemiringan. Kemiringan DEM dikelaskan menjadi 5 kelas. Kemiringan ekstraksi DEM data berupa raster karena itu harus diubah menjadi data shapefile dengan cara reclassify untuk mendapatkan info table kemiringan kemudian dilakukan convert raster to polygon. Setelah diperoleh parameter-parameter tanah longsor kemudian dilakukan pemberian skor pada masing-masing kelas dan bobot pada masing-masing parameter kemudian dioverlaykan. Analisa daerah potensi rawan banjir dan longsor didasarkan pada nilai total skor pada masing-masing area. Penetapan tingkat kerawanan daerah kejadian longsor di daerah penelitian didasarkan kepada model pendugaan kawasan rawan tanah longsor oleh Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi/DVMBG (2004). $Skor = (30\% \times faktor\ kelas\ curah\ hujan) + (20\% \times geologi) + (20\% \times faktor\ kelas\ jenis\ tanah) + (15\% \times penggunaan\ lahan) + (15\% \times faktor\ kelas\ lereng)$

Tabel 1. Parameter Pembobotan Tanah Longsor Parameter Besaran Skor Bobot

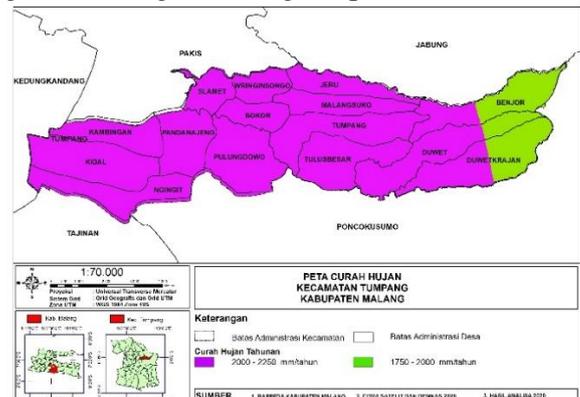
Parameter	Besaran	Skor	Bobot
Kemiringan	<8%	1	15%
	8-15%	2	
	15-25%	3	
	25-45%	4	
	>45%	5	
Curah Hujan Tahunan (mm/tahun)	<1000	1	30%
	1000-2000	2	
	2000-2500	3	
	2500-3000	4	
Jenis Tanah	>3000	5	20%
	Tidak peka	1	
	Agak peka	2	
	Kurang peka	3	
	Peka	4	
Geologi	Sangat peka	5	20%
	Bahan Alluvial	1	
	Bahan Vulkanik 1	2	
	Bahan Sedimen 1	3	
	Bahan Sedimen 2	4	
	Vulkanik 2	4	
Tutupan Lahan	Hutan/vegetasi lebat dan badan air	1	15%
	Kebun dan campuran semak belukar	2	
	Perkebunan dan sawah irigasi	3	
	Kawasan industri dan pemukiman	4	
	Lahan-lahan kosong	5	

Sumber: Hasil Analisa 2020

Hasil dan Pembahasan

1. Curah Hujan

Data curah hujan yang di dapatkan untuk kecamatan tumpang yang dilakukan pengolahan dengan menggunakan arcgis. Daerah curah hujan pada daerah penelitian berkisar antara 1.750-2250 mm/tahun. Peta persebaran kelas curah hujan pada daerah penelitian dapat dilihat pada gambar di bawah.



Gambar 3. Curah Hujan di Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang

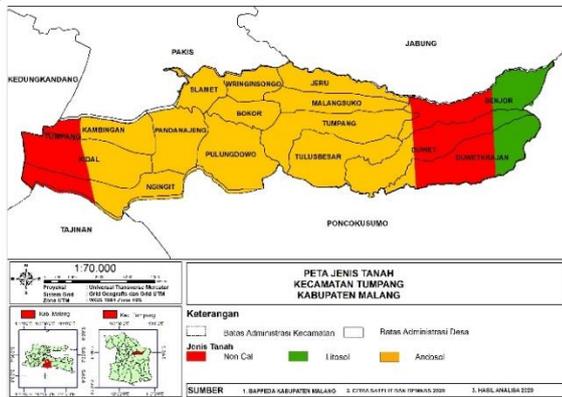
Sumber: Hasil Analisa 2020

Pada peta diatas curah hujan digolongkan menjadi 2 kelas dimana kelas pertama yaitu 1.750 – 2000 mm/tahun dan kelas yang kedua

yaitu 2000 – 2250 mm/tahun. Dari peta diatas dapat dilihat bahwa daerah yang berada di bagian barat memiliki curah hujan yang cukup tinggi.

2. Jenis Tanah

Data Jenis tanah yang berada di kecamatan tumpang didapatkan terdapat 3 jenis tanah yang berada di daerah penelitian yaitu andosol, litosol, dan non cal. Berikut merupakan peta jenis tanah kecamatan tumpang.



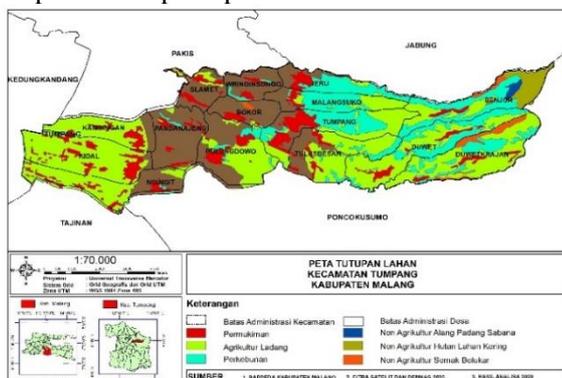
Gambar 4. Jenis Tanah di Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang

Sumber: Hasil Analisa 2020

Dari peta diatas dapat dilihat bahwa daerah yang berada di tengah kecamatan tumpang memiliki jenis tanah andosol. Dimana tanah ini merupakan tanah yang tergolong cukup rawan terjadi longsor.

3. Penggunaan Lahan

Dari dapat yang didapat untuk penggunaan lahan untuk kecamatan tumpang terbagi menjadi 6 klasifikasi yaitu permukiman, agrikultural lading, perkebunan, non agrikultur alang sabana padang, non agrikultur hutan lahan kering dan non agrikultur semak belukar. Dapat dilihat pada peta dibawah berikut.



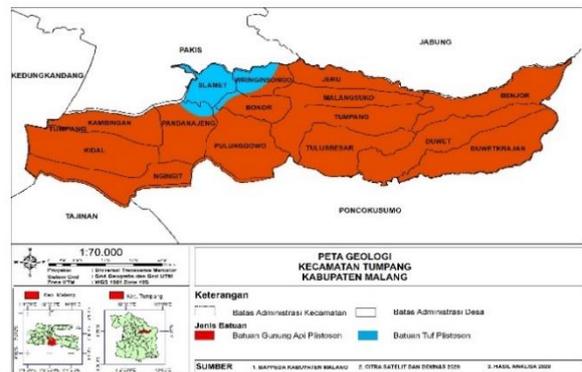
Gambar 5. Penggunaan Lahan di Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang

Sumber: Hasil Analisa 2020

Dari peta diatas dapat dilihat bahwa pada bagian barat daerah penelitian cukup jarang terdapat kawasan permukiman

4. Geologi

Data untuk geologi untuk kecamatan tumpang terbagi menjadi 2 jenis batuan yaitu batuan gunung api plitosen dan batuan tuf plitosen, karena kecamatan ini berada di daerah pegunungan. Berikut merupakan peta geologi daerah penelitian.

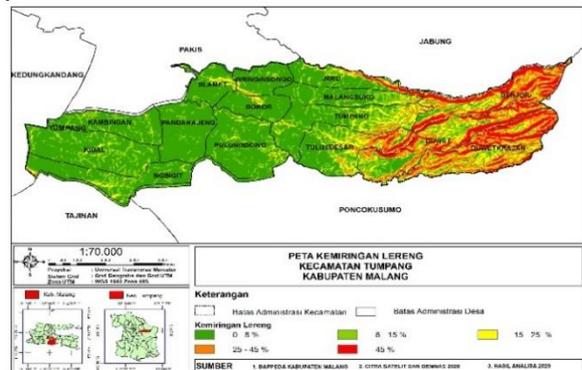


Gambar 6. Geologi di Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang

Sumber: Hasil Analisa 2020

5. Kelerengan

Data kelerengan pada kecamatan tumpang sangat bervariasi dimana dibagi menjadi 5 kelas yaitu 0-8%, 8-15%, 15-25%, 25-45%, dan 45% > berikut merupakan peta kelerengan daerah penelitian.



Gambar 7. Kemiringan Lereng di Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang

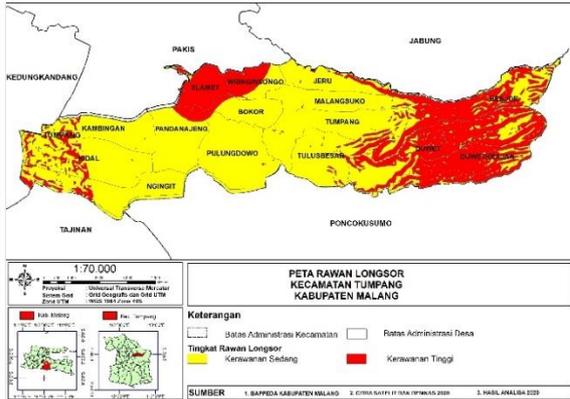
Sumber: Hasil Analisa 2020

Dari peta diatas dapat dilihat bahwa daerah yang berada disebalah timur memiliki kelerengan yang lebih dari 45% dimana daerah tersebut cukup dekat dengan lereng gunung bromo sedangkan daerah di sebelah barat memiliki kelereng yang cukup datar.

6. Daerah Rawan Longsor

Data daerah rawan longsor didapat dari hasil skoring yang didapat dari semua parameter untuk menentukan daerah yang merupakan daerah rawan longsor dan dapat diketahui bahwa parameter yang paling berpengaruh terhadap terjadinya bencana tanah longsor adalah jumlah curah hujan sehingga proporsi nilainya lebih tinggi dari pada parameter lainnya untuk menentukan daerah rawan

longsor. Berikut merupakan peta daerah rawan longsor yang berada di kecamatan tumpang.



Gambar 8. Daerah Rawan Longsor di Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang

Sumber: Hasil Analisa 2020

Dapat dilihat dari peta diatas daerah sebelah barat tergolong daerah yang memiliki tingkat kerawanan longsor sedang berbeda dengan daerah yang berada disebelah timur yang memiliki tingkat rawan longsor yang tinggi dimana pada daerah tersebut banyak sekali terdapat kawasan yang sangat curam serta termasuk dalam kawasan lereng gunung bromo, karena itulah daerah Kecamatan Tumpang yang berada di sebelah timur memiliki tingkat kerawanan longsor sangat tinggi.

Tabel 2. Daerah Rawan Longsor

Desa	Luas Tingkat Kerawanan Longsor (Ha)	
	Sedang	Tinggi
Bokor	185,94	19,86
Pulungdowo	525,08	5,73
Wringinsongo	82,56	111,66
Tumpang	505,99	34,59
Malangsuko	304,31	4,47
Pandanajeng	343,07	45,85
Slamet	4,21	191,13
Duwetkrajana	143,22	493,94
Duwet	189,51	398,95
Benjor	164,86	338,07
Tulusbesar	400,42	86,59
Jeru	223,57	39,38
Ngingit	373,77	42,01
Kidal	509,57	85,72
Kambangan	305,40	18,11
Total	4261,49	1916,05

Sumber: Hasil Analisa 2020

Terdapat 4 dusun dikecamatan tumpang yang termasuk daerah rawan longsor yaitu Dusun Duwet, Dusun Duwet Krajan, Dusun Benjor, dan Dusun Slamet dimana daerah 3

dusun berada di sebelah timur kecamatan tumpang dan 1 dusun berada di sebelah utara Kecamatan Tumpang.

7. Hasil Wawancara

a. Wawancara 1

Hari/tanggal: Kamis, 12 maret 2020

Waktu: 11.40

Lokasi: Kantor Desa Duwet Krajan (Dusun Swaru)

Nama Narasumber: Pak Imam Taufik

Pekerjaan: Kepala Dusun

- Terjadi bencana tanah longsor skala kecil di Dusun Swaru, Krajan, Tosari.
- Pernah terjadi longsor skala kecil di dusun tosari tahun 2020 dan terjadi awal musim hujan
- Ada bantuan dri BPBD, kepolisian, dari warga gotong royong.
- Jenis tanah gembur
- Longsor sering terjadi saat musim hujan
- Penyebab terjadinya bencana longsor karena adanya waktu hujan yang cukup lama
- Sudah terdapat jalur evakuasi langsung ada rencana ada setiap jangka panjang
- Pembuatan sak sak (karung diisi sesuatu) disusun (PPT) untuk sebagai pondasi tanah di setiap bangunan rumah yang di fasilitasi oleh pemerintah
- Untuk Rumah tunggal yang di buat pribadi



Gambar 9. Wawancara Kepala Dusun Swaru, Desa Dawet

Sumber: Hasil Analisa 2020

b. Wawancara 2

Hari/tanggal: Kamis, 12 maret 2020

Waktu: 11.25

Lokasi: Desa Duwet Krajan

Nama Narasumber: Pak Samsul

Pekerjaan: Petani

- Belum pernah terjadi bencana longsor skala besar di sekitar tempat tinggal pak samsul.

- Tanah longsor terjadi hanya dalam skala kecil biasanya terjadi di pekarangan rumah saja
- Sering terjadi kebakaran hutan di sekitar kawasan Bromo



Gambar 8. Wawancara Masyarakat Setempat
Sumber: Hasil Analisa 2020

- c. Wawancara 3
Hari/tanggal: Kamis, 12 maret 2020
Waktu: 12.05
Lokasi: Dusun Tosari
Nama Narasumber: Pak Bagus
Pekerjaan: Petani



Gambar 9. Wawancara Masyarakat Setempat
Sumber: Hasil Analisa 2020

- Terjadi bencana longsor skala kecil di dusun tosari
 - Hanya terdampak pada satu rumah saja
 - Longsor terjadi karena hujan yang cukup lama
 - Jika terjadi bencana longsor akan dibantu langsung oleh BPBD Kabupaten Malang dan gotong royong dari warga sekitar.
- d. Wawancara 4
Hari/tanggal: Kamis, 12 maret 2020
Waktu: 12.05
Lokasi: Dusun Tosari
Nama Narasumber: Pak Tejo



Gambar 10. Wawancara Masyarakat Setempat
Sumber: Hasil Analisa 2020

- Jarang terjadi bencana longsor
- bencana longsor terjadi jika waktu hujan yang cukup lama
- Jika terjadi bencana maka perangkat desa akan langsung melaporkan ke polisi untuk meminta bantuan ke BPBD
- Longsor sering terjadi di perkebunan warga saja
- Pernah terjadi longsor yang membuat jalan di desa hancur

Kesimpulan

Adapun beberapa hal yang bisa disimpulkan dari penelitian ini adalah:

1. Daerah kecamatan tumpang sebelah timur merupakan daerah yang memiliki potensi rawan tanah longsor dikarenakan morfologi daerah tersebut yang curam serta termasuk dalam kawasan lereng gunung bromo, karena itulah daerah kecamatan tumpang yang berada di bagian timur memiliki tingkat kerawanan longsor sangat tinggi.
2. Dari data jenis tanah yang berada di kecamatan tumpang didapatkan terdapat 3 jenis tanah yang berada di daerah penelitian yaitu andosol, litosol, dan non cal. Jenis tanah di beberapa desa yang ada di kecamatan tumpang merupakan jenis tanah andosol. dimana tanah ini merupakan tanah yang tergolong cukup rawan terjadi longsor,
3. Dari data geologi untuk Kecamatan Tumpang terbagi menjadi 2 jenis batuan yaitu batuan gunung api plistosen dan batuan tuf plistosen, karena kecamatan ini berada di daerah pegunungan.
4. Terdapat 4 dusun di Kecamatan Tumpang yang memiliki luasan daerah terbesar untuk daerah rawan longsor dengan tingkat kerawanan tinggi yaitu dusun duwet yang memiliki luasan daerah rawan longsor sebesar 398,95 Ha, dusun duwet krajan sebesar 493,94 Ha, dusun benjor sebesar 338,07 Ha, dan dusun slamet sebesar 191,13 Ha, dimana 3 dusun berada di sebelah timur Kecamatan Tumpang dan 1 dusun

berada di sebelah utara kecamatan tumpang.

5. Terdapat 5 dusun di Kecamatan Tumpang yang memiliki luasan terbesar untuk daerah rawan longsor dengan tingkat kerawanan sedang yaitu dusun pulungdowo yang memiliki luasan daerah rawan longsor sebesar 525,08 Ha, dusun tumpang sebesar 505,99 Ha, dusun tulusbesar sebesar 400,42 Ha, dan dusun tulusbesar sebesar 509,57 Ha

Ucapan Terimakasih

Ucapan terimakasih disampaikan kepada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Nasional Malang, yang telah memberikan kesempatan serta bimbingan kepada kami untuk melakukan kajian ilmiah terkait penentuan zona daerah rawan bencana longsor di Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang

Daftar Pustaka

- 1) Taufik Dr. Ir. M. Kurniawan Akbar, Rohmah Alfi. (2016). Identifikasi Daerah Rawan Tanah Longsor Menggunakan SIG (Sistem Informasi Geografis) (Studi Kasus: Kabupaten Kediri) ISSN: 2337-3539.
- 2) Sutasoma Muwardi, Susilo Adi, Suryo Eko Andi. (2017). Penyelidikan Zona Longsor dengan Metode Resistivitas dan Analisis Stabilitas Lereng untuk Mitigasi Bencana Tanah Longsor (Studi Kasus di Dusun Jawar, Desa Sri Mulyo, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur), ISSN:2089 – 0133.
- 3) Khafid, Mohammad Abdul, (2019). Analisis Penentuan Zonasi Pemukiman Risiko Bencana Tanah Longsor Berbasis Sistem Informasi Geografis: Studi Kasus Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta
- 4) Anastasia Dewi Titisari, Hitznaiti Zaidini Khul Husna, Ilham Dharmawan Putra, I Gde Budi Indrawan, (2019). *Penentuan Zona Kerentanan Longsor Berdasarkan Karakteristik Geologi dan Alterasi Batuan*, 141 – 158.
- 5) Bayuaji, Dhuha Ginanjar, Nugraha Arief Laila, (2016). Analisis Penentuan Zonasi Risiko Bencana Tanah Longsor Berbasis Sistem Informasi Geografis (Studi Kasus: Kabupaten Banjarnegara).
- 6) Bahrudin, Muhammad Joko Umbaran Haris, (2018). Zonasi Daerah Rawan Longsor Menggunakan Analisis Sistem Informasi Geografis Berdasarkan Metode AHP Pada Daerah Gunung Kidul Yogyakarta.
- 7) Nasiah & Invanni Ichsan, (2014). Identifikasi Daerah Rawan Bencana Longsor Lahan Sebagai Upaya Penanggulangan Bencana di Kabupaten Sinjai, ISSN 2086-6755.
- 8) Riyanto, Muhammad Zaki, (2019). Studi Pendahuluan Penentuan Zonasi Kerentanan Gerakan Tanah di Kawasan Desa Binaan UIN Sunan Kalijaga di Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, D.I. Yogyakarta
- 9) Mulyaningsih, Sari & Setiadi Tedy, (2014). Sistem Informasi Geografis Pemetaan Daerah Rawan Tanah Longsor Di Kabupaten Gunung Kidul Berbasis Web, e-ISSN 2338-5197
- 10) Handayani, Linda & Singarimbun, Alamta, (2016). Pemetaan Daerah Rawan Longsor Di Sekitar Daerah Prospek Panas Bumi Provinsi Jawa Barat, ISSN 2502-2016.
- 11) Hamida, Fakhryza Nabila & Widiasamratri, Hasti, (2019). Risiko Kawasan Longsor Dalam Upaya Mitigasi Bencana Menggunakan Sistem Informasi Geografis.
- 12) Bayuaji, Dhuha Ginanjar & Nugraha, Arief Laila, Sukmono, Abdi, (2016). Analisis Penentuan Zonasi Risiko Bencana Tanah Longsor Berbasis Sistem Informasi Geografis (Studi Kasus: Kabupaten Banjarnegara).
- 13) Subhan, Murti Laksono, & Barus, (2019). Identifikasi Dan Analisis Karakteristik Longsor Di Kabupaten Garut, e-ISSN 2502-5295.
- 14) Nasiah, & Invanni, Ichsan, (2013). Zonasi Daerah Rawan Bencana Longsor Di Sulawesi Selatan.
- 15) Anastasia Dewi Titisari, Hitznaiti Zaidini' Khul Husna, Ilham Dharmawan Putra, & I Gde Budi Indrawan, (2019). *Penentuan Zona Kerentanan Longsor Berdasarkan Karakteristik Geologi dan Alterasi Batuan*, 141 – 158

RAPID ASESMEN KERUSAKAN BANGUNAN PASCA GEMPA BUMI DI SEKITAR MASJID AT-TAQARRUB, TRIENGGADING, PIDIE JAYA, ACEH

Aldrin Febriansyah
Program Arsitektur, Fakultas Sains Dan Teknologi
Universitas PGRI Yogyakarta
aldrin@upy.ac.id

Abstract

The earthquake that occurred on 7 December 2016 with a magnitude of 6.4 SR in Pidie Jaya District, Aceh has resulted in many material and immaterial losses. Where many facilities and infrastructure are damaged, buildings are not multi-storey to high-rise buildings. One of them is a residential area around the At-Taqarrub mosque, which is in the Keude area, Trienggading sub-district, Pidie Jaya district. At-Taqarrub Mosque is one of the worship facilities that is heavily damaged and cannot be repaired. In the area only the At-Taqarrub mosque was the only building that collapsed, while the surrounding buildings were still standing with various kinds of damage. This journal is to find out the results of rapid assessment of the level of damage to buildings against structures and building materials around the At-Taqarrub mosque. The method used is the method of mapping and direct survey of the surrounding buildings and then determine the level of damage to the structural components and building architecture. The results of this study indicate various levels of post-earthquake building damage that occur and provide recommendations for buildings damaged in the earthquake in Pidie Jaya in particular and throughout Indonesia in general.

Keywords: rapid assessment, earthquake, At-taqarrub, Pidie Jaya

Abstrak

Gempa bumi yang terjadi pada tanggal 7 desember 2016 dengan kekuatan 6,4 SR di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh telah mengakibatkan banyak kerugian material dan immaterial. Dimana banyak sarana dan prasarana rusak, bangunan tidak bertingkat sampai dengan bangunan bertingkat tinggi. Salah satunya adalah wilayah pemukiman di sekitar masjid At-Taqarrub, yang berada di wilayah Keude, kecamatan Trienggading kabupaten Pidie Jaya. Masjid At-Taqarrub merupakan salah satu sarana peribadatan yang mengalami rusak berat dan tidak dapat lagi di perbaiki. Di Kawasan tersebut hanya masjid At-Taqarrub merupakan satu-satunya bangunan yang runtuh, sedang bangunan sekitarnya masih berdiri dengan berbagai macam kerusakan. Jurnal ini untuk mengetahui hasil rapid asesmen dari tingkat kerusakan bangunan terhadap struktur dan material bangunan di sekitar masjid At-Taqarrub. Metode yang digunakan adalah metode pemetaan dan survey secara langsung terhadap bangunan disekitarnya kemudian menentukan tingkat kerusakan komponen struktur maupun arsitektur bangunannya. Hasil penelitian ini menunjukkan berbagai macam tingkat kerusakan bangunan pasca gempa bumi yang terjadi dan memberikan rekomendasi terhadap bangunan yang rusak terkena gempa bumi di Pidie Jaya secara khusus dan di seluruh Indonesia secara umum. Abstrak tidak memuat sitasi, rumus, tabel dan gambar.

Kata Kunci: Rapid asesmen, gempa bumi, At-Taqarrub, Pidie Jaya

Pendahuluan

Gempa yang terjadi pada Rabu, 7 Desember 2016 sekitar Jam 05:03 WIB yang berpusat di Wilayah Meureudu Pidie Jaya dengan magnitude 6.5 Skala Richter (SR) merupakan gempa sesar geser (strike slip). Lokasi gempa terletak di laut berdekatan dengan Patahan Samalanga namun agak sedikit ke bagian barat. Berdasarkan mekanisme gempa, arah strike dari gempa diperkirakan mengarah barat laut. Dari peta model elevasi permukaan bumi terlihat ada patahan berdekatan dengan Patahan Samalanga dan kelihatannya gempa tersebut terletak di sepanjang patahan tersebut. Gempa bumi dengan kekuatan 6,5 Skala Richter (SR) tersebut yang telah mengguncang Kabupaten Pidie Jaya yang mengakibatkan korban jiwa yang tidak sedikit (baik korban luka ringan sampai dengan korban

meninggal) kemudian juga merusak bangunan beserta fasilitas umum lainnya yang mengalami rusak ringan hingga runtuh.

Berdasarkan hasil pengamatan cepat sepanjang jalan Banda Aceh – Pidie Jaya – Bireueun Aceh, gempa telah menyebabkan banyak bangunan rubuh serta rusak. Kebanyakan bangunan yang rubuh adalah bangunan yang berlantai lebih dari satu tingkat. Beberapa bangunan yang rubuh adalah bangunan publik seperti bangunan sekolah/dayah, perguruan tinggi, masjid-masjid, ruko (rumah toko) dan pasar serta fasilitas kesehatan seperti rumah sakit. Rumah rumah masyarakat juga mengalami kerusakan berat, sedang dan ringan, termasuk di dalamnya rumah-rumah masyarakat yang hanya berlantai satu.

Berdasarkan tingkat kerusakan di setiap daerah, daerah yang mengalami kerusakan berat adalah

kecamatan Trieng Gading, Pidie Jaya, daerah ini merupakan daerah yang terdekat dengan epicentrum gempa. Dimana salah satu bangunan yang mengalami kerusakan pada daerah tersebut hingga runtuh adalah masjid At-Taqarrub yang berada di Gampong Keude, kecamatan Trienggading, Kabupaten Pidie Jaya. Populer disebut dengan masjid Pheb, karena pada awal dibangun memiliki struktur atap dan kubah yang rendah kemudian dengan kapasitas 600 orang masjid ini berada pada arah jalan masuk menuju kota Pidie Jaya, masjid berada di kawasan tepi pantai dan dikelilingi oleh pemukiman penduduk, juga terdapat pasar tradisional.

Kerusakan yang terjadi pada kawasan tersebut perlu adanya pemeriksaan yang akhirnya dapat ditemukan cakupan tingkat kerusakan awal bangunan dan jenis kerusakan bangunan, termasuk juga masjid At-Taqarrub yang berada didalamnya. Pemeriksaan dilakukan secara visual, terhadap komponen struktur bangunan, arsitektur bangunan, dan utilitas secara menyeluruh. Pelaksanaan pemeriksaan juga simultan dengan penilaian kerusakan bangunan yang dititik beratkan pada penilaian kerusakan pada bangunan publik seperti sekolah dan masjid, kemudian penilaian kerusakan bangunan milik warga (rumah tinggal, ruko, dan lain-lain) didalam kawasan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan pola sebaran tingkat kerusakan bangunan akibat gempa bumi, dan merumuskan usulan serta rekomendasi kedepan bagaimana cara membangun bangunan tahan gempa bagi masyarakat maupun pemerintah setempat.

Metode

Metode survey yang digunakan ada 2 (dua) macam yaitu metode pemetaan secara digital dan metode pemeriksaan langsung tingkat kerusakan bangunan. Pada metode pemetaan secara digital yang dilakukan adalah menentukan batasan wilayah penelitian yang terkena gempa bumi secara digital (baik CAD maupun GIS). Batasan wilayah sudah ditentukan berada di kawasan masjid At-Taqarrub dan sekitarnya. Kemudian pada metode pemeriksaan langsung yang dilakukan adalah terjun langsung ke lapangan untuk melihat dan memeriksa kerusakan bangunan di kawasan berdasarkan pada tingkat kerusakan bangunan yang terkait.

Setelah survey, kemudian dilakukan metode analisa. Data-data dari metode survey digunakan kemudian dianalisa berdasarkan pada standardisasi data kebencanaan dari BNPB dan pedoman teknis bangunan tahan gempa serta pedoman pembangunan bangunan tahan gempa dari PUPR. Hasil dari metode analisa ini dapat menjadi acuan dalam menentukan rekomendasi. Rekomendasi tersebut diantaranya bangunan rusak ringan dapat digunakan langsung, bangunan rusak sedang dapat digunakan secara terbatas dan hati-hati, dan

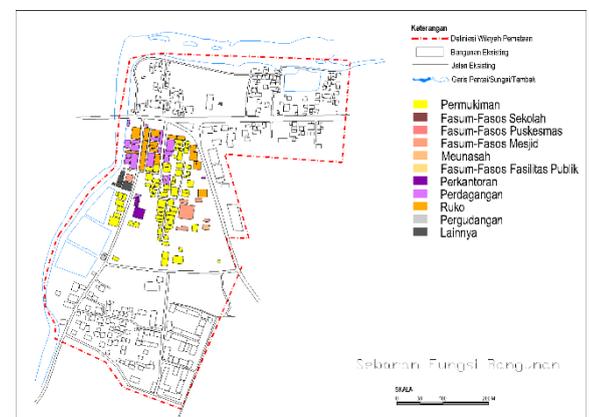
bangunan rusak berat tidak boleh digunakan atau harus dirobohkan dan dibangun ulang.

Dalam metode analisa ini data yang ditemukan kemudian dikategorikan menjadi 4 (empat) bagian, yaitu kategori fungsi bangunan, kategori ketinggian lantai bangunan, kategori kerusakan bangunan (ringan, sedang, berat), dan kategori bangunan heritage.

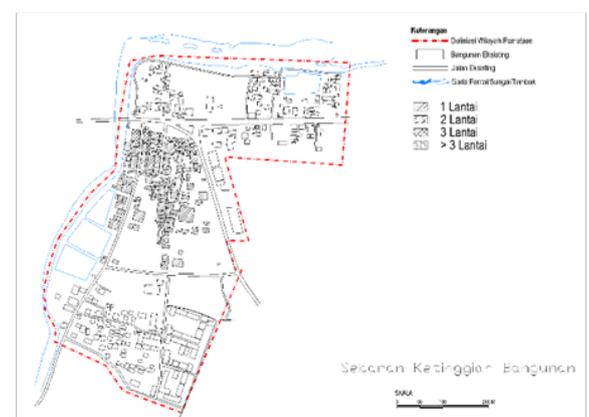
Hasil dan pembahasan

Hasil dari penelitian ini berupa temuan yang menjelaskan pola kerusakan bangunan pada wilayah masjid At-Taqarrub. Temuan ini dikategorikan menjadi 4 bagian :

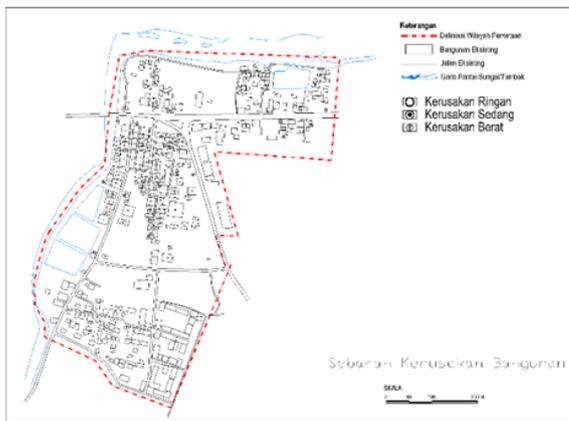
1. Kategori fungsi bangunan, pada wilayah ditemukan berbagai macam fungsi bangunan seperti bangunan pemukiman warga, perdagangan, ruko 2 lantai, masjid, dan perkantoran;
2. Kategori ketinggian bangunan, pada wilayah ditemukan berbagai macam ketinggian bangunan mulai dari 1 lantai, 2 lantai dan 3 lantai (ketinggian tertinggi);
3. Kategori kerusakan bangunan, pada wilayah ditemukan jenis kerusakan bangunan yaitu rusak bangunan rusak ringan, bangunan rusak sedang, dan bangunan rusak berat.
4. Kategori bangunan heritage, dimana definisi bangunan heritage disini adalah bangunan dengan usia diatas 50 (lima puluh) tahun.



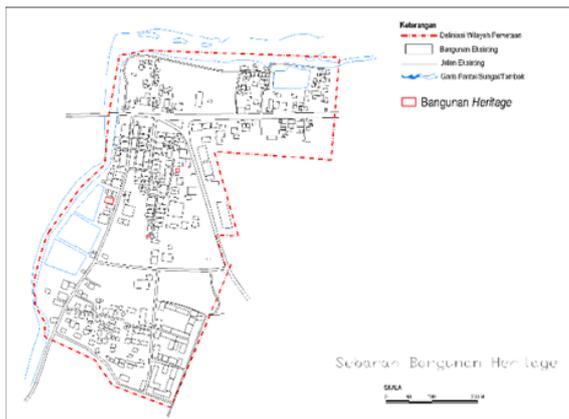
Gambar 1. Kategori Fungsi Bangunan



Gambar 2. Kategori Ketinggian Bangunan



Gambar 3. Kategori Kerusakan Bangunan



Gambar 4. Kategori Bangunan Heritage

Dari hasil survey diatas, terutama pada gambar III. Kategori kerusakan bangunan ditemukan bahwa hampir seluruh bangunan mengalami kerusakan baik itu rusak ringan, rusak sedang maupun rusak berat. Berdasarkan pada Perka BNPB no 8 tahun 2011, mengenai Standardisasi Data Kebencanaan, maka :

1. Rusak ringan, definisi adalah kriteria kerusakan yang mengakibatkan sebagian komponen struktur retak (struktur masih bisa digunakan) dan bangunan masih tetap berdiri, sebagai contoh : (1) sebagian kecil struktur bangunan rusak ringan; (2) retak-retak pada dinding plesteran; (3) sebagian kecil pintu-pintu air

dan komponen penunjang lainnya rusak; (4) saluran pengairan masih bisa digunakan.

2. Rusak sedang, definisi adalah kriteria kerusakan yang mengakibatkan sebagian kecil komponen struktur rusak, dan komponen penunjang rusak namun bangunan masih tetap berdiri, sebagai contoh : (1) sebagian kecil struktur utama bangunan rusak; (2) sebagian besar pintu-pintu air dan komponen penunjang lainnya rusak; (3) saluran pengairan terputus.

3. Rusak berat, kriteria kerusakan yang mengakibatkan bangunan roboh atau sebagian besar komponen struktur rusak, sebagai contoh : (1) bangunan roboh total / sebagian besar struktur utama bangunan rusak; (2) sebagian besar dinding dan lantai bangunan bendung atau dam patah; (3) sebagian besar tanggul jebol atau putus; (4) saluran pengairan tidak dapat berfungsi).

Kemudian juga nampak pada kategori I dan kategori II sebagian besar bangunan 1 lantai adalah pemukiman warga dan bangunan 2 lantai hingga diatas dari 3 lantai merupakan bangunan ruko, perdagangan maupun kantor. Pada kategori IV ada bangunan heritage dengan usia diatas 50 tahun merupakan bangunan 1 lantai dengan struktur material kayu yang tidak mengalami kerusakan akibat gempa. Berdasarkan rapid asesmen secara langsung bangunan yang mengalami kerusakan kondisinya karena ada penggunaan material dan struktur yang tidak sesuai dengan standar bangunan seharusnya. Dalam membangun bangunan, terutama di wilayah zona rawan gempa, seperti area Pidie Jaya dan sekitarnya, pembangunan seharusnya mengacu pada peraturan dari pemerintah mengenai pedoman bangunan tahan gempa beserta pedoman teknis bangunan tahan gempa.

Bila dibuatkan ke dalam tabel maka nampak bahwa keseluruhan bangunan mengalami kerusakan berdasarkan pada kriterianya masing-masing.

Tabel 1. Analisa data, 2020

	Kerusakan Bangunan	Kategori Bangunan			Keterangan
		ketinggian	Fungsi	Heritage	
Rusak Ringan	110 bangunan	-.91 bangunan lantai 1; -. 19 bangunan lantai 2.	-.pemukiman, -.perdagangan, -.perkantoran, -.masjid, -.ruko, -. lainnya	3 bangunan	retak dinding, dan bangunan masih dapat dipergunakan
Rusak Sedang	10 bangunan	-.7 bangunan lantai 1; -. 3 bangunan lantai 2.	-.pemukiman, -.perdagangan, -.perkantoran, -.masjid, -.ruko, -. lainnya	-	struktur bangunan masih berdiri dan penghuni berhati hati
Rusak Berat	8 bangunan	-.1 bangunan lantai 1, -.1 bangunan lantai 2.	-.masjid, -. Lainnya.	-	bangunan dirubuhkan

^adata pasca gempa tahun 2017



Gambar 5. Ukuran Tulangan struktur standar



Gambar 6. Masjid At-Taqarrub sebelum gempa



Gambar 7. Masjid At-Taqarrub setelah gempa

Simpulan

Dalam Simpulan ini berisi resume dari analisis dan pembahasan. Secara umum adalah sebagai berikut :

1. Tipikal kerusakan pada bangunan adalah sangat umum dijumpai seperti runtuh dan retakan pada dinding pasangan, rangka atap, ataupun runtuh total akibat kualitas bahan yang sangat rendah dan tidak sesuai persyaratan bangunan serta mayoritas bangunan tidak mengikuti persyaratan teknis yang benar seperti tanpa rangka struktur balok dan kolom.

2. Banyak ditemukan bangunan dengan kondisi struktur dan material yang baik hanya



Gambar 8. Bangunan Heritage

mengalami kerusakan ringan, hal ini dapat menjadi contoh dan perlunya sosialisasi ke tukang bangunan dan mandor tentang cara membangun bangunan yang benar dan sesuai dengan standar pedoman dari pemerintah.

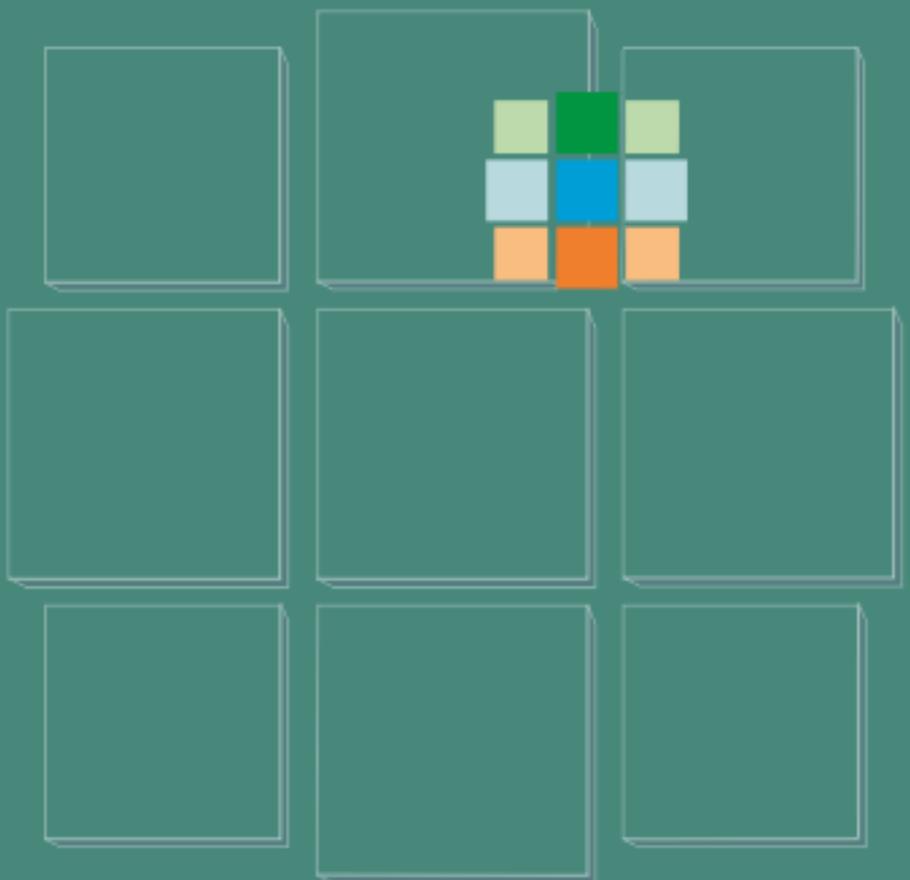
3. Bangunan heritage dimana bangunan berusia diatas 50 (limapuluh) tahun dengan material struktur kayu ternyata mampu bertahan lebih baik daripada bangunan modern yang menggunakan material terkini. Mengapa lebih banyak bangunan modern daripada bangunan heritage karena masyarakat menganggap bahwa bangunan modern lebih menonjolkan status sosial mereka lebih tinggi dengan bangunan modern daripada bangunan heritage.

Ucapan terima kasih

Ucapan terima kasih dan apresiasi penulis ucapkan kepada KARTAGAMA beserta IAI DIY karena telah berperan besar dalam penelitian ini terwujud.

Daftar Pustaka

- 1) Kartagama, 2017, Laporan Kegiatan Asesmen Pidie Jaya
- 2) Tim Pusat Studi Gempa Nasional, 2016, Kajian Gempa Pidie Jaya Provinsi Aceh (M6.5)
- 3) BNPB, 2011, Standarisasi Data Kebencanaan
- 4) Dirjen Cipta Karya, 2006, Pedoman Teknis Bangunan Tahan Gempa
- 5) Dirjen Cipta Karya, 1993, Pedoman Pembangunan Bangunan Tahan Gempa



9 772656 741002